



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 3

(1) RPJPD disusun berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Demokrasi;
- c. Berkeadilan;
- d. Keterpaduan;
- e. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- f. Transparansi;
- g. Keterbukaan;
- h. Otonomi Daerah;
- i. Tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. Berkelanjutan;
- k. Berwawasan lingkungan;
- l. Efisien; dan

- m. efektif
- (2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. Koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat;
- c. Partisipasi masyarakat; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RPJPD meliputi;
 - a. Gambaran umum kondisi daerah;
 - b. Visi dan misi;
 - c. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang;
 - d. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
 - e. Tahapan dan prioritas pembangunan
- (2) Tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. RPJMD I Tahun 2005-2010
 - b. RPJMD II Tahun 2011-2015
 - c. RPJMD III Tahun 2016-2020
 - d. RPJMD IV Tahun 2021-2025

BAB IV

SISTEMATIKA DAN URAIAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJPD disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB III : ANALISIS ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI KABUPATEN BONE BOLANGO 2005-2025

BAB V : ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2005-2025

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

- (2) Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJP Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025.

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.
- (4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.

- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (6) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup terhadap realisasi sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (7) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (8) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM /POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya perlunya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa

20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Bone Bolango digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Bone Bolango pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bone Bolango.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 adalah untuk:

- a. mendukung kelancaran koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 Agustus 2014

**TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005-2025**

**URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. LATAR BELAKANG

Secara historis, ke-ruang-an Kabupaten Bone Bolango berdiri di atas wilayah bekas kerajaan Suwawa dan Bolango. Keduanya adalah anggota serikat kerajaan (*confederasi*) dari lima kerajaan besar yang disebut ***utuwawu duluwo limo lo pohala'a*** (lima kerajaan dalam perikatan dua kerajaan yang berasal dari asal usul yang satu). Lima kerajaan dimaksud pada mulanya adalah Suwawa (inklusif Bone), Limutu (Limboto), Hulontalo (Gorontalo), Bolango dan Atinggola (inklusif (Bintauna). Setelah kerajaan Atinggola non aktif, lalu digantikan oleh kerajaan Boalemo pada sekitar tahun 1837 Masehi. Sedangkan dua kerajaan yang dimaksud dalam perserikatan tersebut, karena faktor alam, pada awalnya adalah kerajaan Suwawa dan Limutu, selanjutnya menunjuk Pada kerajaan Limutu dan Hulontalo, pasca perang saudara antar keduanya yang diakhiri dengan perjanjian damai pada sekitar tahun 1673 M. Adapun ***utuwawu*** (yang satu) menunjuk pada kerajaan Suwawa sebagai kerajaan tertua, sehingga sering disebut ***ti yombu*** (nenek moyang) bagi masyarakat dan kerajaan lainnya. **Harmoni** kehidupan perserikatan kerajaan terikat kuat dalam sumpah adat yang dapat tergambar dengan penegasan para leluhur melalui *paduma* (pedoman) sebagai berikut: ***wanu lumengge eluto Suwawa Limutu paliyalo, Wanu mopahuto eluto Limutu dehuwalo Hulontalo*** (jika keris terangkat sedikit saja dari sarungnya, Suwawa dan Limboto akan terluka, Jika keris dicabut dari sarungnya, maka Limboto dan Gorontalo akan ikut tertimpa).

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Bone Bolango resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Lahirnya Kabupaten Bone Bolango disemangati oleh keinginan luhur bagi terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta keinginan bersama untuk mengefisiensikan rentang kendali pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar pertimbangan lahirnya pembentukan Kabupaten Bone Bolango yaitu:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Nomor 01 tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Rekomendasi / Pernyataan Sikap Pembentukan Kabupaten Baru.
2. Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Baru dari Bupati Gorontalo Nomor : 135/01.387/2002 tanggal 26 Pebruari 2002.
3. Usul Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dari Bupati Gorontalo Nomor: 135/01/491/2002.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Nomor 14 tahun 2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bone Bolango.
5. Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dari Gubernur Gorontalo Nomor 135/01/711/2002 tanggal 14 Maret 2002.
6. Kesimpulan Notulen Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Ketua-Ketua Komisi, Ketua-Ketua Fraksi dengan Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) Bone Bolango.
7. Naskah Persetujuan Deklarasi Pembentukan Kabupaten Gorontalo Timur oleh Bupati Gorontalo, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
8. Naskah Komunike Bersama Pembentukan Kabupaten Gorontalo Timur Provinsi Gorontalo.
9. Naskah Fatwa *Dulohupa* Pembentukan Kabupaten Gorontalo Timur Provinsi Gorontalo.
10. Rekomendasi DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 176/DPRD/380/2002 tanggal 8 Maret 2002.
11. Kesepakatan *Dulohupa* Jakarta KSPKB dan Simpul Kecamatan tanggal 6 Maret 2002.

Sebagai sebuah daerah pemekaran baru yang terbentuk pada Tahun 2003, Kabupaten Bone Bolango terus mengalami perkembangan secara terus menerus baik dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Terdapat beragam tantangan dan permasalahan pembangunan daerah yang perlu diatasi serta membutuhkan peran, inovasi dan sinergitas seluruh

stakeholders pembangunan. Permasalahan mendasar tersebut diantaranya: tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi, keterbatasan infrastruktur wilayah, rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan belum berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan, masih rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya kompetensi anak didik dan lulusan, terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan dan belum efektif dan efisiennya tata kelola pemerintah daerah.

Untuk menjawab tantangan di atas maka orientasi pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat serta pemerataan pembangunan melalui pertumbuhan yang berkeadilan (*growth with equity*), yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta penyediaan infrastruktur dasar wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Bone Bolango, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Bolango, guna member arah, mengintegrasikan dan mensinergikan serta menjaga kesinambungan perencanaan antar waktu, antar pelaku, maupun antar wilayah di Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.

1.2. PROSES PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN BONE BOLANGO

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan konprehensif Kabupaten Bone Bolango yang memuat kondisi umum , visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Bolango dalam periode 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi,

misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah antara lain dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan nya Undang-Undang tentang RPJP Nasional tahun 2005-2025 adalah untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan maka perlu juga dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang nasional. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen

masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi publik.

RPJP Daerah di susun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah dimana kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional dan penyusunan RPJP Daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). RPJP Kabupaten Bone Bolango di susun dengan tahapan dan langkah-langka sebagai berikut:

Tahap Pertama, penyiapan rancangan RPJP oleh Bappeda Kabupaten Bone Bolango untuk mendapatkan gambaran awal dari visi misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Tahap Kedua, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang daerah dibawah koordinasi Bappeda sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas visi misi dan arah pembangunan yang telah disusun.

Tahap Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJPD berdasarkan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Tahap Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN RPJPD KABUPATEN BONE BOLANGO

a. Maksud RPJPD Kabupaten Bone Bolango

RPJPD Kabupaten Bone Bolango ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh komponen (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

b. Tujuan RPJPD Kabupaten Bone Bolango

RPJPD Kabupaten Bone Bolango ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah/pedoman yang jelas bagi pembangunan di Kabupaten Bone Bolango selama 20 tahun;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
3. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan; dan
4. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bone Bolango dilakukan berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.5. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

- a. RPJPD Kabupaten Bone Bolango 2011-2025 merupakan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2011-2025. Dokumen RPJPD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan Propinsi, dan selanjutnya berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Bone Bolango.
- b. Dokumen RPJPD Kabupaten Bone Bolango disusun dengan mengacu, merujuk, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi Gorontalo, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Propinsi, RTRW dan RTR Pulau. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bone Bolango dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional.

1.6. SISTIMATIKA PENULISAN

RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2025 memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta

diupayakan pencapaiannya, mencakup aspek pembangunan dari segala bidang kehidupan, baik sebagai daerah otonom maupun sebagai bagian dari Provinsi Gorontalo dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJPD Kabupaten Bone Bolango disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD harus disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerahterkait, termasuk pedoman pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterkaitan dengan dokumen lain, seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota

1.4. Sistimatika Penulisan

Menggunakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai

kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

Bab III Analisis Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu merupakan salah satu bagian terpenting dokumen

RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan disisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Masing-masing misi dapat disajikan sub misi dan penjelasan yang

memadai bagaimana maksud dan arah dari masing-masing misi.

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dalam bagian ini terlebih dahulu diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pada bagian ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi.

5.2. Tahapan prioritas

Pada bagian ini diuraikan sasaran pokok yang menjadi prioritas utama di masing-masing tahapan.

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi dan arah kebijakan daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD. menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.7. ALUR PIKIR

Kabupaten Bone Bolango sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Provinsi Gorontalo dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghadapi hal yang sama di masa-masa yang akan datang, dengan melihat fakta dan kecenderungan yang ada, berbagai langkah harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo yang pada gilirannya akan mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang berkelanjutan.

Alur pikir penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dapat ditunjukkan melalui gambar diagram di bawah ini:

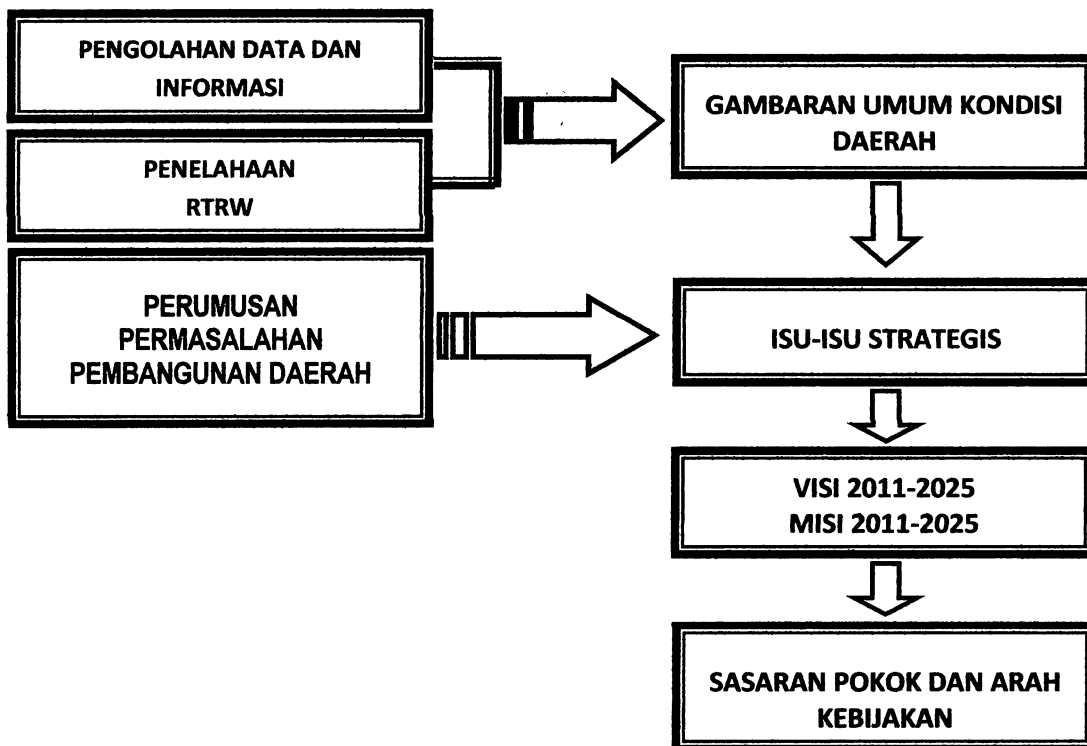
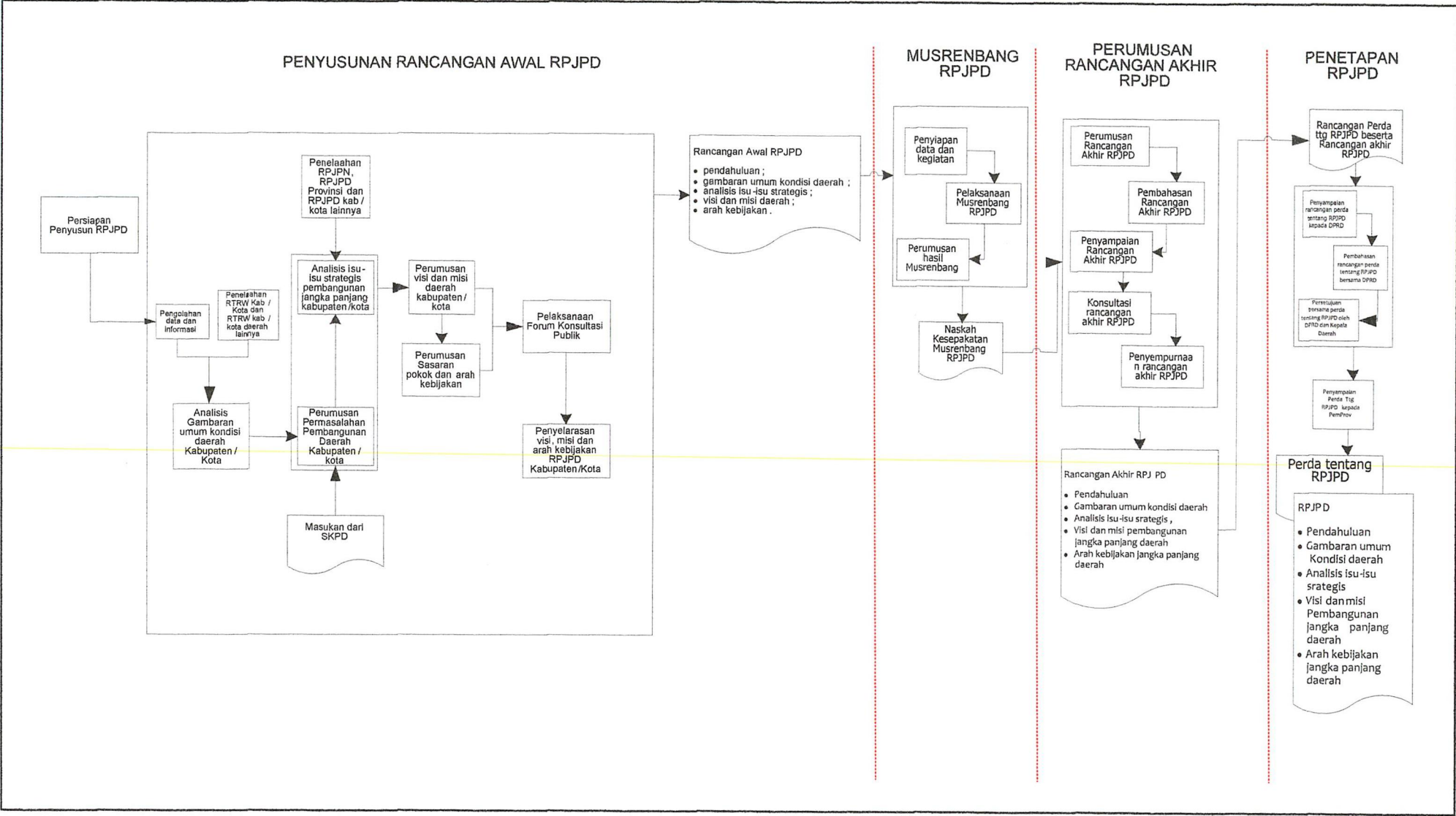


Diagram 1.1 : Alur Pikir Penyusunan RPJPD Kabupaten Bone Bolango 2011-2025

Dari diagram 1.1 menunjukan bahwa:

1. RPJPD disusun berangkat dari kondisi umum daerah saat ini, yang meliputi kondisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2. Dengan kondisi saat ini serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang diharapkan tersebut ditetapkanlah visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
3. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, isu-isu strategis, modal dasar, visi dan misi, maka dirumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi : a) Arah-an Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintahan Daerah; dan b) fungsi penataan ruang dan pengembangan wilayah pembangunan mengacu pada data dan informasi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
4. Arah-an pembangunan di atas, kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan RTRW sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan dan kebijakan penataan ruang. Kebijakan pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan.

1.8. Alur Proses Penyusunan RPJP Daerah



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu di bidang aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Disamping banyaknya kemajuan yang telah dicapai masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan sehingga masih perlu upaya untuk mengatasinya dalam rangka pembangunan daerah kearah yang lebih baik.

1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Secara geografis luas wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni 1.984,31 Km² atau 16,24 persen dari total luas Provinsi Gorontalo dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 385,92 Km² atau 19,45 persen dari luas wilayah Kabupaten Bone Bolango, sementara untuk daerah terkecil adalah Kecamatan Bulango Selatan dengan luas 9,87 Km² atau 0,50 persen dari luas wilayah Kabupaten Bone Bolango. Secara administrasi Kabupaten Bone Bolango dibatasi oleh:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - Sebelah Barat dengan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo
- Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2012 terdiri dari 18 Kecamatan, 160 Desa dan 5 Kelurahan, yang secara administrasi yakni:

1. Kecamatan Tapa, terdiri dari 7 Desa, yaitu Desa Talulobutu, Talumopatu, Dunggala, Langge, Talulobutu Selatan, Keramat dan Meranti.
2. Kecamatan Bulango Utara, terdiri dari 9 Desa, yaitu Desa Bandungan, Boidu, Tupa, Longalo, Tuloa, Lomaya, Kopi, Bunuo dan Suka Damai.

3. Kecamatan Bulango Selatan, terdiri dari 10 Desa, yaitu Desa Ayula Selatan, Huntu Selatan, Huntu Utara, Ayula Utara, Ayula Tilango, Lamahu, Mekar Jaya, Ayula Timur, Sejahtera dan Tinelo Ayula.
4. Kecamatan Bulango Timur, terdiri dari 5 Desa, yaitu Desa Bulotalangi, Bulotalangi Barat, Bulotalangi Timur, Toluwaya dan Popodu.
5. Kecamatan Bulango Ulu, terdiri dari 7 Desa, yaitu Desa Owata, Mongiilo, Mongiilo Utara, Pilolaheya, Ilomata, Suka Makmur dan UPT Owata.
6. Kecamatan Kabila, terdiri dari 7 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu Desa Dutohe, Tanggilingo, Toto Selatan, Poowo, Talango, Poowo Barat, Dutohe Barat, Kelurahan Padengo, Oluhuta, Tumbihe, Pauwo dan Oluhuta Utara.
7. Kecamatan Botupingge, terdiri dari 9 desa yaitu Desa Buata, Luwohu, Timbuolo, Panggulo, Timbuolo Timur, Tanah Putih, Timbuolo Tengah, Panggulo Barat dan Sukma.
8. Kecamatan Tilongkabila, terdiri dari 14 desa yaitu Desa Toto Utara, Tamboo, Bonggoime, Bongopini, Moutong, Tunggulo, Lonuo, Motilango, Iloheluma, Permata, Butu, Tunggulo Selatan, Berlian dan Bongohulawa.
9. Kecamatan Suwawa, terdiri dari 10 desa yaitu Desa Tingkohubu, Boludawa, Bube, Huluduotamo, Bubeya, Bube Baru, Tinelo, Ulantha, Tingkohubu Timur dan Helumo.
10. Kecamatan Suwawa Selatan, terdiri dari 8 desa yaitu Desa Bulontala, Libungo, Molintogupo, Bonedaa, Bondawuna, Bulontala Timur, Pancuran dan Bonda Raya.
11. Kecamatan Suwawa Timur, terdiri dari 6 desa yaitu Desa Tulabolo, Dumbayabulan, Tulabolo Timur, Tulabolo Barat, Poduwoma, Pangi, Tinemba, Tilangobula dan Panggulo.
12. Kecamatan Suwawa Tengah, terdiri dari 6 desa yaitu Desa Lompotoo, Lombongo, Duano, Tolomato, Alale dan Tapadaa.
13. Kecamatan Bone Pantai, terdiri dari 13 desa yaitu Desa Tolotio, Tamboo, Bilungala, Tongo, Uabanga, Bilungala Utara, Tihu, Lembah Hijau, Tunas Jaya, Ombulo Hijau, Batu Hijau, Kamiri dan Pelita Hijau.
14. Kecamatan Kabila Bone, terdiri dari 9 desa yaitu Desa Huangobotu, Molotabu, Oluhuta, Botubarani, Biluango, Modelomo, Botutonuo, Olele dan Bintalahe.

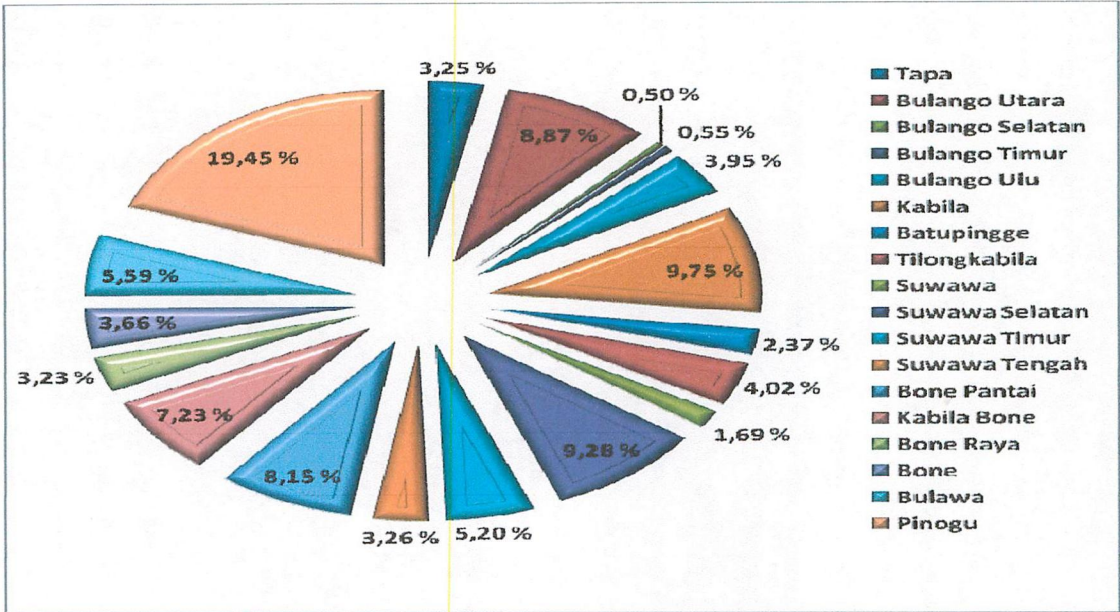
15. Kecamatan Bone Raya, terdiri dari 9 desa yaitu Desa Inomata, Tombulilato, Mootinelo, Mootayu, Mootawa, Pelita Jaya, Laut Biru, Alo dan Moopiya.
16. Kecamatan Bone, terdiri dari 14 desa yaitu Desa Monano, Sogitia, Taludaa, Bilolantunga, Moodulio, Inogaluma, Tumbuh Mekar, Molamahu, Ilohuhuwa, Masiaga, Muara Bone, Waluhu, Cendana Putih dan Permata.
17. Kecamatan Bulawa, terdiri dari 9 desa yaitu Desa Kaidundu, Mamungaa, Kaidundu Barat, Mopuya, Pinomontiga, Dunggilata, Mamungaa Timur, Bukit Hijau dan Patoa.
18. Kecamatan Pinogu, terdiri dari 5 desa yaitu Desa Pinogu, Bangio, Dataran Hijau, Pinogu Permai dan Tilonggibila.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1	Tapa	64,42	3,25
2	Kabila	193,45	9,75
3	Bulango Selatan	9,87	0,50
4	Suwawa	33,51	1,69
5	Suwawa Tengah	64,7	3,26
6	Bone Pantai	161,82	8,15
7	Bulango Timur	10,82	0,55
8	Kabila Bone	143,51	7,23
9	Bulango Utara	176,09	8,87
10	Botupingge	47,11	2,37
11	Tilongkabila	79,74	4,02
12	Suwawa Timur	103,28	5,20
13	Bulango Ulu	78,41	3,95
14	Bone	72,71	3,66
15	Bone Raya	64,12	3,23
16	Suwawa Selatan	184,09	9,28
17	Bulawa	111,01	5,59
18	Pinogu	385,92	19,45
T O T A L		1984,31	100,00

Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka Kab.Bone Bolango, Tahun 2012

Grafik 2.1
Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango



Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka Kab.Bone Bolango,Tahun 2012

1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Bone Bolango cukup variatif yang didominasi oleh kelas lereng datar dengan kemiringan lereng 15 - 25 %, disusul oleh kelas kemiringan lereng 25 - 40 % dan kelas-kelas lereng lainnya seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan Peta Kelas Kemiringan Lereng. Jadi, jika digunakan kriteria yang dikeluarkan di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/1980, yang menyatakan bahwa lahan dengan kemiringan lereng > 40 % harus menjadi kawasan lindung, maka 17.078,6 Ha (9.09 %) dari lahan di Kabupaten Bone Bolango tidak boleh dibudidayakan dengan kendalanya adalah bahaya erosi. Keadaan bentangan alam seperti tersebut di atas sangat mempengaruhi karakteristik dasar Kabupaten Bone Bolango khususnya pada kondisi fisik wilayah.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng diatas 40% dan bertekstur morfologi yang kasar. Persebaran lahan dengan ciri tersebut berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila Bone, Bone, Bone Raya, Botupingge dan Tilongkabila.

Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan hampir sebagian besar berada di setiap kecamatan di Kabupaten Bone Bolango. Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di

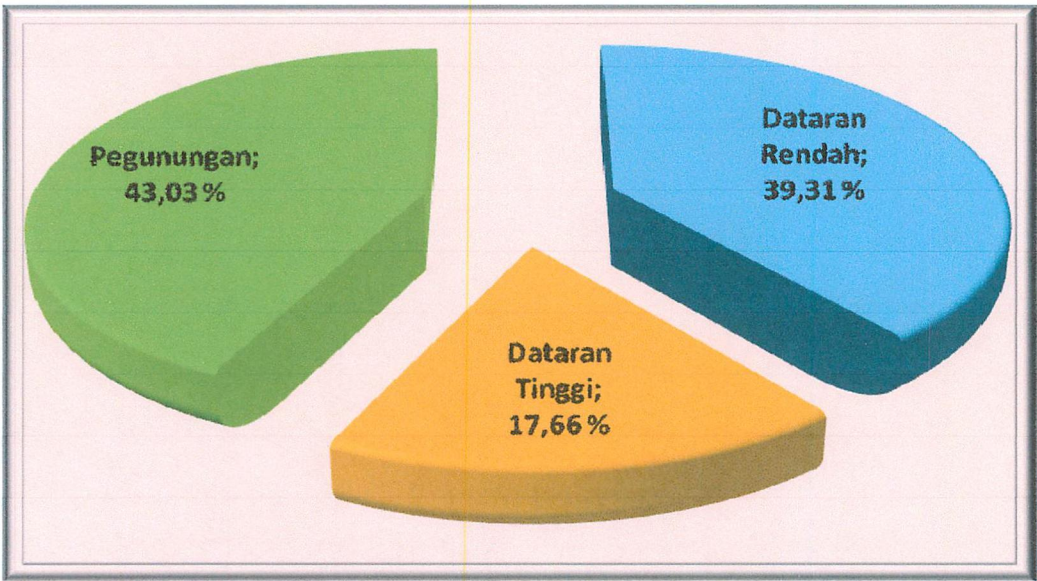
Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila. Luas wilayah menurut kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Luas Kecamatan Menurut Keadaan Tanah
di Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	KEADAAN TANAH (Km ²)			JUMLAH
		Dataran Rendah	Dataran Tinggi	Pegunungan	
1	2	3	4	5	6
1	Tapa	12,58	4,5	47,34	64,42
2	Bulango Utara	49,92	42,36	83,81	176,09
3	Bulango Selatan	9,87	0	0	9,87
4	Bulango Timur	7,9	2,92	0	10,82
5	Bulango Ulu	17,47	29,57	31,37	78,41
6	Kabila	193,45	0	0	193,45
7	Batupingge	13,2	17,56	16,35	47,11
8	Tilongkabila	67,21	9,17	3,36	79,74
9	Suwawa	17,94	9,05	6,52	33,51
10	Suwawa Selatan	63,93	33,03	87,13	184,09
11	Suwawa Timur	65,91	15,68	21,69	103,28
12	Suwawa Tengah	15,25	10,25	39,2	64,7
13	Bone Pantai	40,61	0	121,21	161,82
14	Kabila Bone	40,48	0	103,03	143,51
15	Bone Raya	11,66	24,16	28,3	64,12
16	Bone	10,91	26,90	34,90	72,71
17	Bulawa	12,05	38,76	60,2	111,01
18	Pinogu	129,77	86,52	169,63	385,92
TOTAL		780,11	350,43	854,04	1.984,58

Sumber : Diolah dari Kecamatan Dalam Angka Kab. Bone Bolango, Tahun 2012

Grafik 2.2
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Berdasarkan Kondisi Lereng



Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka Kab.Bone Bolango,Tahun 2012

1.3. Kondisi Klimatologi

Di daerah ini dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Pada bulan Oktober sampai April arus angin berasal dari barat/barat laut yang banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim penghujan. Sementara itu pada bulan Juni sampai September arus angin berasal dari timur yang tidak mengandung uap air. Curah hujan pada suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan pertemuan arus angin. Curah hujan di Kabupaten Bone Bolango rata-rata 38 mm-378 mm dan keadaan angin pada dikisaran anatara 10 meter/detik sampai 15 meter/detik. Suhu rata-rata bulanan di Kabupaten Bone Bolango adalah sekitar 24,4° C sampai 28,0°C.

1.4. Kondisi Geologi

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone Bolango diantaranya adalah kawasan rawan gempa. Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Bone Bolango meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dengan skala lebih dari VII MMI. Kawasan lindung geologi yaitu kawasan rawan gempa bumi terbagi atas 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

- Stabil, meliputi Kecamatan Bone (4.018,91 ha) ; Bone Pantai (1.256,52 ha); Bone Raya (487,24 ha); Botupingge (26,5 ha); Bulango Selatan (0,74 ha); Bulango Timur (378,8 ha); Bulango Ulu (1.517,88 ha); Bulango Utara (817,78 ha); Bulawa (651,24 ha); Kabila Bone (224,53 ha); Suwawa (287,5 ha); Suwawa Selatan (1.839,7 ha); Suwawa Tengah (790,53 ha); Suwawa Timur (18.326,72 ha); Tapa (326,74 ha) dan Kecamatan Tilongkabila (943,27 ha).
- Kurang Stabil, meliputi Kecamatan Bone (11.317,91 ha); Bone Pantai (9.265,96 ha); Bone Raya (5.705,79 ha); Botupingge (1.571,2 ha); Bulango Selatan (567,94 ha); Bulango Timur (804,17 ha); Bulango Ulu (24.228,77 ha); Bulango Utara (9.956,37 ha); Bulawa (8.474,89 ha); Kabila (1.273,82 ha); Kabila Bone (5.574,72 ha); Suwawa (5.462,67 ha); Suwawa Selatan (3.752,24 ha); Suwawa Tengah (1.552,3 ha); Suwawa Timur (64.196,25 ha); Tapa (939,08 ha) dan Tilongkabila (3.805,09 ha).
- Tidak Stabil, meliputi Kecamatan Bone Pantai (25,82 ha) dan Kabila Bone (45,64 ha).

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bone Bolango lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam seperti kondisi fisik topografis, alur aliran air, curah hujan yang tinggi, peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai dan pendangkalan muara sungai. Sisi lain, peristiwa banjir memberikan arahan tafsiran bahwa telah terjadi degradasi ekosistem *up land*, sehingga ekosistem tersebut tidak mampu melakukan fungsi secara maksimal. Daerah-daerah yang rawan banjir tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya adalah:

1. Sebagian Kecamatan Bulango Timur (Desa Bulotalangi, Bulotalangi Barat, Bulotalangi Timur, Popodu dan Toluwaya);
2. Sebagian Kecamatan Bulango Utara (Desa Bandungan, Boidu, Kopi, Lomaya, Suka Damai dan Tupa);
3. Sebagian Kecamatan Tapa (Desa Dunggala, Kramat, Langge, Talulobutu, Talulobutu Selatan dan Talumopatu);
4. Sebagian Kecamatan Bulango Selatan (Desa Ayula Selatan, Ayula Tilango, Ayula Timur, Ayula Utara, Huntu Selatan, Huntu Utara, Lamahu, Mekar Jaya, Sejahtera dan Tinelo Ayula);
5. Sebagian Kecamatan suwawa (Desa Boludawa, Bube, Bube Baru, Bubeya, Tinelo, Tingkohobu, Tingkohobu Timur dan Ulanta);
6. Sebagian Kecamatan Suwawa Selatan (Desa Bondawuna, Bondaraya, Bonedaa, Bulontala, Bulontala Timur, Libungo, Molintogupo dan Pancuran);
7. Sebagian Kecamatan Suwawa Timur (Desa Dumbayabulan, Panggulo, Poduwoma, Tilangobula, Tulabolo dan Tulabolo Timur);
8. Sebagian Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Alale, Duano, Lombongo, Lompotoo, Tapadaa dan Tolomato);
9. Sebagian Kecamatan Kabila Bone (Desa Oluhuta);
10. Sebagian Kecamatan Bulawa (Desa Kaidundu Barat, Mamungaa Timur, Pinomontiga dan Mamungaa);
11. Sebagian Kecamatan Bone Pantai (Desa Lembah Hijau, Tamboo dan Tolotio);
12. Sebagian Kecamatan Bone Raya (Desa Mootayu);
13. Sebagian Kecamatan Bone (Desa Bilolantunga, Cendana Putih, Inogaluma, Masiaga, Molamahu, Monano, Muara Bone, Sogitia, Taludaa, Tumbuh Mekar dan Waluhu);
14. Sebagian Kecamatan Botupingge (Desa Buata, Luwohu, Panggulo, Panggulo Barat, Tanah Putih, Timbuolo, Timbuolo Tengah dan Timbuolo Timur);

15. Sebagian Kecamatan Kabila (Desa Dutohe, Dutohe Barat, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Pauwo, Poowo, Poowo Barat, Talango, Tanggilingo, Toto Selatan dan Tumbihe); dan
16. Sebagian Kecamatan Tilongkabila (Desa Bongopini, Mootilango, Permata, Tamboo dan Tunggulo Selatan).

1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Bone Bolango meliputi perairan darat dan perairan laut. Perairan darat antara lain sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air bersih, irigasi dan perikanan darat. Sedangkan perairan laut dapat dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan penangkapan ikan laut.

Kabupaten Bone Bolango mempunyai dua Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu DAS Bone dan DAS Bolango. Kedua DAS ini bermuara pada satu tempat yaitu Teluk Tomini/Teluk Gorontalo. Di samping itu juga ditemukan banyak DAS-DAS kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan di pinggiran kawasan pantai.

Tabel 2.3
Nama-Nama Sungai Besar dan Kecil
Di Kabupaten Bone Bolango

NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	KECAMATAN YANG DILALUI
Bone	90,00	Suwawa, Botupingge, Kabila
Bolango	40,00	Tapa, Bulango, Tilongkabila
Tamboo	3,50	Kabila Bone
Inengo	10,25	Kabila Bone
Kiki	5,00	Kabila Bone
Molotabu	5,50	Kabila Bone
Aladi	5,00	Kabila Bone
Bututonuo	7,25	Kabila Bone
Oluhuta	3,75	Kabila Bone
Olele	4,00	Bone Pantai
Tolotio	6,25	Bone Pantai
Butalo	11,50	Bone Pantai
Bilungala	15,00	Bone Pantai
Tongokiki	6,50	Bone Pantai
Tongodaa	2,75	Bone Pantai
Uabanga	7,75	Bone Pantai, Bone Raya
Tombulilato	20,00	Bone Raya
Ombulo	3,50	Bone Raya
Mamunga Daa	7,00	Bone Raya
Mopuya Daa	5,00	Bone Raya
Mopuya Kiki	3,50	Bone Raya
Tapambudu	3,25	Bone Raya, Bone
Monano	9,50	Bone
Topidaa	3,50	Bone
SogitaDaa	6,50	Bone
Sogita Kiki	5,50	Bone
Taludaa	18,00	Bone

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia, Tahun 199

1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah yang paling dekat serta berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan Pusat kegiatan Nasional. Kedekatan wilayah tersebut memberi ruang aksesibilitas yang sangat tinggi serta proses interaksi aktivitas sosial ekonomi dengan Kota Gorontalo serta memberikan beragam dampak polarisasi ruang bagi pengembangan wilayah Bone Bolango. Dengan karakteristik wilayah sebagai daerah hulu dengan daya dukung kawasan lindung kurang lebih 73% memposisikan Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah penyangga ekosistem lingkungan regional.

Dengan keterbatasan areal bagi pengembangan aktivitas sosial ekonomi di Kota Gorontalo, akan memposisikan wilayah Bone Bolango sebagai areal pengembangan potensial bagi proses konurbasi dan perluasan aktivitas jasa dan perekonomian daerah. Ketersediaan beragam potensi sumber daya alam baik sumber daya darat maupun sumber daya kelautan membawa keunggulan komparatif bagi pengembangan daya saing daerah dalam kompetisi regional dalam jangka panjang. Potensi sumber daya air yang sangat besar memberikan daya dukung positif bagi pengembangan aktivitas pertanian, perikanan, energi dan penyediaan air minum bagi masyarakat Bone Bolango dan wilayah sekitar. Disamping itu, potensi pertambangan baik mineral logam dan mineral bukan logam serta potensi batuan yang cukup besar akan semakin memperkuat daya saing wilayah dalam jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan wilayah Bone Bolango memperhatikan daya dukung lingkungan internal serta faktor-faktor eksternal yang membawa pengaruh bagi perkembangan wilayah Kabupaten Bone Bolango. Beberapa arahan pengembangan yang potensial tumbuh cepat antara lain pengembangan kawasan strategis pendidikan Kabila – Tilonkabila - Suwawa, Kawasan Strategis Jasa Perdagangan Kabila, Kawasan Strategis Bone Pesisir, Kawasan Strategis Pertambangan serta pengembangan Suwawa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.

1.7. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango sampai dengan tahun 2011 mencapai 152.763 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah kepadatan sebesar 77 jiwa/km². Kepadatan penduduk

terbesar terdapat di Kecamatan Bulango Selatan dengan jumlah kepadatan sebesar 1030 jiwa/km² dan kepadatan terkecil terdapat pada Kecamatan Pinogu dengan jumlah kepadatan 7 jiwa/km².

Tabel 2.4
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/ km ²)
		km ²	%	Jiwa	%	
1	Tapa	64,41	3,25	7.563	4,95	117
2	Bulango Utara	176,10	8,87	7.291	4,77	41
3	Bulango Selatan	9,87	0,50	10.168	6,66	1030
4	Bulango Timur	10,82	0,55	5.292	3,46	489
5	Bulango Ulu	78,41	3,95	3.878	2,54	49
6	Kabila	193,45	9,75	22.332	14,62	115
7	Botupingge	47,11	2,37	6.120	4,01	130
8	Tilongkabila	79,74	4,02	17.034	11,15	214
9	Suwawa	33,51	1,69	11.898	7,79	355
10	Suwawa Selatan	184,09	9,28	5.158	3,38	28
11	Suwawa Timur	128,20	6,46	5.057		40
12	Suwawa Tengah	64,70	3,26	6.151	4,03	95
13	Bone Pantai	161,82	8,15	10.789	7,06	67
14	Kabila Bone	143,51	7,23	10.817	7,08	75
15	Bone Raya	64,13	3,23	6.486	4,25	101
16	Bone	72,71	3,66	9.374	6,14	129
17	Bulawa	111,01	5,59	5.228	3,42	47
18	Pinogu	361,00	18,19	2.055		6
T O T A L		1.984,58	100,00	152.763	100,00	77

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango Tahun 2012

Berdasarkan sex ratio atau angka perbandingan antar jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 sebesar 101 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan beberapa Kecamatan yang angka sex rasionya lebih dari 100 persen.

Tabel 2.5
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tapa	3.732	3.831	7.563	97
2	Bulango Utara	3.653	3.638	7.291	100
3	Bulango Selatan	5.022	5.146	10.168	98
4	Bulango Timur	2.611	2.681	5.292	97
5	Bulango Ulu	2.022	1.856	3.878	109
6	Kabila	10.985	11.347	22.332	97
7	Botupingge	3.086	3.034	6.120	102
8	Tilongkabila	8.400	8.634	17.034	97
9	Suwawa	5.947	5.951	11.898	100
10	Suwawa Selatan	2.636	2.522	5.158	105
11	Suwawa Timur	2.665	2.392	5.057	104
12	Suwawa Tengah	3.137	3.014	6.151	104
13	Bone Pantai	5.472	5.317	10.789	103
14	Kabila Bone	5.585	5.232	10.817	107
15	Bone Raya	3.328	3.158	6.486	105
16	Bone	4.794	4.580	9.374	105
17	Bulawa	2.695	2.533	5.228	106
18	Pinogu	994	1.061	2.055	97
T O T A L		76.885	75.098	152.763	101

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango Tahun 2012

Sampai tahun 2025 setiap daerah secara tidak langsung akan mengalami tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2011 sebesar 152.763 jiwa orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 200.000 jiwa orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara tiap kecamatan lebih merata.

2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Hingga tahun 2011, struktur perekonomian Bone Bolango masih didominasi oleh peran sektor primer dengan kecenderungan menurun secara relative dalam lima tahun terakhir, sementara sektor tersier secara relative cenderung meningkat secara perlahan seiring dengan perkembangan pembangunan daerah Bone Bolango.

Tabel 2.6
Struktur Ekonomi Kabupaten Bone Bolango

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	41,41	40,56	41,15	39,63	39,57
2	Pertambangan & Penggalian	0,54	0,56	0,79	0,63	0,67
3	Industri Pengolahan	14,10	13,25	12,16	12,12	11,84
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,45	0,39	0,34	0,31	0,32
5	Bangunan	4,95	4,80	5,41	4,67	4,97
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	11,94	13,45	13,10	12,18	11,20
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,39	4,10	5,15	3,86	3,80
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,35	10,66	9,68	10,96	11,09
9	Jasa-Jasa	11,86	12,24	12,21	15,63	16,54

Sumber : BPS Bone Bolango, Tahun 2012

Lima sektor yang berpengaruh besar pada pembentukan output ekonomi daerah yaitu sektor Pertanian (39,57%), sektor Jasa (16,54%), Industri Pengolahan (11,84%), sektor Perdagangan (11,20%) dan sektor Keuangan & Jasa Perusahaan (11,09%). Kecepatan pergeseran dan penguatan kelima sektor tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang responsif terhadap pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.7
Perkembangan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango

No	Sektor	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah)	611.269	717.387	831.504	937.685	1.019.512
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta rupiah)	232.300	247.031	263.061	280.568	299.911
4	Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	5,88	6,34	6,49	6,66	6,89

Sumber : BPS Kab. Bone Bolango,Tahun 2012

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012

No	Sektor	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	8,21	6,47	7.55
2	Pertambangan & Penggalian	8,62	5,90	3.23
3	Industri Pengolahan	4,36	4,68	4.73
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,56	7,03	7.16
5	Bangunan	4,84	13,31	12.43
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4,64	7,65	5.82
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,34	3,42	4.45
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,90	8,80	7.76
9	Jasa-Jasa	5,31	5,79	7.29
PDRB		6,66	6,91	7.12

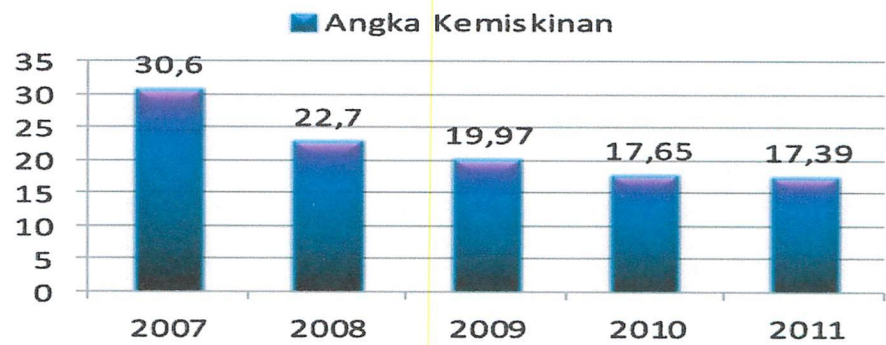
Sumber : BPS Kab. Bone Bolango,Tahun 2012

Perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan data BPS Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2011 sebesar 3,93 % dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,79 %, jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2009 dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,08% dengan partisipasi angkatan kerja sebesar 59,70% dan begitu juga pada tahun 2010 dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,28% dengan partisipasi angkatan kerja sebesar 61,53%. Jika dilihat tren tiga tahun terakhir memang

tingkat pengangguran terbuka terus menurun tetapi harus tetap harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk menekan jumlah pengangguran tersebut. Secara umum pengangguran di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan, keterampilan dan penguasaan teknologi masih rendah, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan, keterbatasan modal dan akses ke perbankan, serta keterbatasan sarana prasarana.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango 30,85 persen. Tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan, hingga pada tahun 2011 tercatat sebesar 17,39 persen.

Tabel 2.9
Trend Angka Kemiskinan Tahun 2007-Tahun 2011
di Kabupaten Bone Bolango



Sumber : BPS Bone Bolango, Tahun 2012

Tabel 2.10
Rumah Tangga Miskin (RTM)
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KLASTER			JUMLAH	
			HAMPIR MISKIN	MISKIN	KRONIS MISKIN	TOTAL	%
1	BONE	2.488	212	458	339	1009	40,55
2	BONE RAYA	1.263	70	180	246	496	39,27
3	BONEPANTAI	2.146	347	638	306	1291	60,16
4	BOTUPINGGE	1.627	133	192	93	418	25,70
5	BULANGO SELATAN	2.670	197	152	64	413	15,47
6	BULANGO TIMUR	1.290	128	123	59	310	24,03
7	BULANGO ULU	876	116	220	127	463	52,85
8	BULANGO UTARA	1.979	227	323	157	707	35,73
9	BULAWA	1.321	122	165	124	411	31,11
10	KABILA	5.786	397	580	266	1243	21,48
11	KABILA BONE	2.429	371	485	439	1295	53,31
12	SUWAWA SELATAN	1.351	239	260	116	615	45,52
13	SUWAWA TENGAH	1.533	239	331	144	714	46,58
14	SUWAWA TIMUR	1.286	173	232	122	527	40,97

15	SUWAWA	3.104	319	421	172	912	29,38
16	TAPA	1.779	204	210	83	497	27,93
17	TILONGKABILA	4.416	444	546	263	1253	28,37
18	PINOGU	565	112	208	80	400	70,79
JUMLAH		37.909	4.050	5.724	3.200	12.974	34,22

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango, 2012

2.2. Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengevaluasi dampak pembangunan berdasarkan pendekatan sosial. IPM tersusun dari tiga indeks yaitu: indeks kesehatan dengan indikator angka harapan hidup; indeks pendidikan dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; dan indeks pendapatan dengan indikator pengeluaran riil per kapita. Peningkatan IPM suatu daerah dapat terwujud apabila ada keberpihakan yang kuat, konsisten dan berkelanjutan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan derajat pendidikan dan peningkatan standar hidup (meningkatnya pendapatan).

Tahun 2008 IPM Kabupaten Bone Bolango mencapai 70,50 dan pada tahun 2011 naik menjadi 72,22. Berdasarkan perbandingan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo IPM Kabupaten Bone Bolango berada di posisi kedua setelah Kota Gorontalo 73,55. Pada tahun 2025 IPM Kabupaten Bone Bolango diharapkan tetap berada di atas rata-rata nasional.

Tabel 2.11
IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2008-2011

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
1	Kabupaten Boalemo	67,75	68,03	68,69	69,01
2	Kabupaten Gorontalo	68,94	69,55	70,07	70,45
3	Kabupaten Pohuwato	68,93	69,43	69,77	70,09
4	Kabupaten Bone Bolango	70,50	71,19	71,71	72,22
5	Kabupaten Gorontalo Utara	68,14	68,41	68,81	69,24
6	Kota Gorontalo	72,12	72,44	73,08	73,55
7	Provinsi Gorontalo	69,29	69,79	70,28	70,82

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango 2012

Tabel 2.12
Capaian IPM se Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

KECAMATAN	CAPAIAN 2011			
	INDEKS KESEHATAN	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS DAYA BELI	IPM KECAMATAN
Tapa	75,19	86,67	64,23	75,36
Kabila	70,17	89,04	59,07	72,76
Bulango selatan	75,8	85,34	56,77	72,64
Suwawa	73,31	87,8	56,23	72,45
Suwawa tengah	80,37	88,64	45,51	71,84
Bonepantai	76,02	84,12	54,03	71,39
Bulango timur*	71,49	87,3	53,42	70,73
Kabila bone*	69,73	81,9	50,87	67,5
Bulango utara*	72,04	79,56	49,36	66,99
Botupingge*	74,86	87,04	36,73	66,21
Tilongkabila*	78,7	85,4	29,67	64,59
Suwawa timur*	80,91	83,29	19,85	61,35
Bulango ulu*	70,79	76,56	35,12	60,82
Bone*	72,55	84,19	24,01	60,25
Bone raya*	71,67	86,18	21,35	59,73
Suwawa selatan*	77,92	81,44	17,02	58,79
Bulawa*	77,74	75,59	18,38	57,24

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango 2012

Tabel 2.13
Trend Capaian IPM Tahun 2004-2011
Kabupaten Bone Bolango & Provinsi Gorontalo

KABUPATEN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BONE BOLANGO	65,00	67,30	68,60	69,74	70,50	71,19	71,71	72,22
PROVINSI GORONTALO	65,4	67,5	68	68,83	69,29	69,79	70,28	70,82

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango 2012

b. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan, maka sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan

belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Bone Bolango sampai tahun 2011 berdasarkan tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut : Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) adalah 125 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.560 siswa dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 361 guru. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 136 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 19.073 siswa dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 1.299 guru. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 38 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 5.709 siswa dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 608 guru. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 16 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 4.162 siswa dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 411 guru.

Tabel 2.14
Ratio Guru/Siswa
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Ratio Guru/Siswa
1	TK	125	361	3.560	0,10
2	SD	136	1.299	19.073	0,07
3	SMP	38	608	5.709	0,11
4	SMA	16	411	4.162	0,09
TOTAL		315	2.679	32.504	0,08

Sumber : BPS Kab. Bone Bolango Tahun 2012

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selama ini mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 2.15
Perkembangan APK dan APM tingkat SD s/d SLTA
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2011

URAIAN	TAHUN (%)		
	2009	2010	2011
Angka Partisipasi Murni (APM)			
1. Tingkat SD	87,49	91,23	93,06
2. Tingkat SMP	49,37	58,12	57,28
3. Tingkat SMA	30,43	36,12	35,62
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
1. Tingkat SD	98,47	105,16	109,80
2. Tingkat SMP	69,14	78,89	95,52
3. Tingkat SMA	38,66	66,65	56,03
Angka Putus Sekolah (APS)			
1. Tingkat SD	0,6	0,9	1,3
2. Tingkat SMP	2,4	0,56	1,6

3. Tingkat SMA	1,7	0,69	0,
Angka Buta Huruf 15-44 Thn	-	1,28	1,
Angka Melek Huruf	92,0	98,72	98,

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, 2012

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI pada tahun 2011 ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sedangkan untuk tingkatan SMP dan SMA/MA/SMK cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkatan SD dan SMP mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan untuk tingkatan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.16
Trend Angka Partisipasi Murni
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004-2012

JENJANG	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
APM SD/MI	93,95	86,34	87,49	87,37	91,23	93,06	98,10	97,96
APM SMP/MTs	38,06	50,36	49,37	48,65	58,12	57,28	65,89	50,39
APM SLTA/MA	17,49	25,58	30,43	30,43	36,12	35,62	42,66	52,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, 2012

c. Kesehatan

Indikator kesehatan di Kabupaten Bone Bolango antara lain dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita dan status gizi. Sejak Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 indikator kesehatan memperlihatkan kecenderungan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.17
Beberapa Indikator Kesehatan Tahun 2009-2011
di Kabupaten Bone Bolango

No	Indikator	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Angka Kematian Bayi	8,5	15,26	18,8	16,2	17,5
2	Angka Kematian Ibu melahirkan	19,5	435,9	326,3	297,03	185,8
3	Angka Kematian Balita	2	4,36	4,4	3,6	1,1
4	Prevalensi Gizi Buruk	1,09 %	0,70 %	0,80%	0.40%	1,09 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, 2012

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, kematian bayi baru lahir (neonatus) merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya angka kematian balita (AKB). Dalam rentang 2007-2011, angka neonatus tidak pernah mengalami penurunan. Penyebab kematian terbanyak pada periode ini,

disebabkan oleh sepsis (infeksi sistemik), kelainan bawaan, dan infeksi saluran pernapasan atas.

Angka Kematian Ibu atau AKI mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan, sosial ekonomi, keadaan kesehatan kurang baik menjelang kehamilan. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa angka kematian ibu setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi tetap angka kematian ibu di tahun 2011 sebesar 185 per 100.000 KLH masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target 2011 yaitu 150 per 100.000 KLH. Tingginya Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Bone Bolango antara lain disebabkan oleh HPP, infeksi. Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kuantitas maupun kualitas tenaga bidan terutama di wilayah terpencil, pengembangan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) yang belum berjalan maksimal, kondisi sosial ekonomi masih rendah yang juga mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan pertolongan persalinan oleh dukun masih tinggi, kunjungan rumah (*sweeping*) post persalinan belum optimal, serta letak geografis yang masih sulit dijangkau.

Angka kematian balita di Kabupaten Bone Bolango berada dibawah target angka kematian balita nasional tahun 2011 yaitu sebesar 58 per 1.000 kelahiran hidup. Langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Bone Bolango dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita diantaranya berupa Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan deteksi dini penemuan penyakit Pneumonia, diare dan lainnya melalui pelayanan Posyandu.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

3.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan

yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh, berakhlak mulia serta meningkatkan daya saing.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selama ini mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari perkembangan jumlah pendidik, kualitas pendidik dan sarana prasarana pendukung. Dilihat dari aspek kualifikasi tenaga pendidik sekitar 55,30% dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2 dan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-4 maka Pemerintah Bone Bolango bertekad untuk terus memacu peningkatan kualifikasi tenaga guru yang ada. Selain itu jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada memang masih jauh dari memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam rangka memenuhi standar pelayanan pendidikan yang paripurna kepada anak didik, keterbatasan tersebut bukanlah merupakan suatu hambatan dalam operasionalnya.

Tabel 2.18
Jumlah Guru Pada Tingkat TK s/d SMA
Tahun 2009-2011

TAHUN	Guru pada Tingkat Pendidikan (orang)			
	TK	SD/IBTIDAIYAH	SMP/TSANAWIYAH	SMA/ALIYAH
2009	245	2.404	568	325
2010	251	1.280	598	433
2011	351	1.299	608	422

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, 2012

Tabel 2.19
Kondisi Tingkat Pendidikan Guru Pada Tingkat
SD s/d SMA Di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009-2011

TAHUN	Tingkat Pendidikan Guru SD (orang)					Tingkat Pendidikan Guru SMP (orang)				Tingkat Pendidikan Guru SMA (orang)			
	SMP	SMA	S1	S2	S3	SMA	S1	S2	S3	SMA	S1	S2	S3
2009	-	573	208	-	-	16	418	2	-	-	142	5	-
2010	28	502	271	-	-	14	348	1	-	-	187	6	-
2011	21	325	413	15	-	39	407	11	-	-	151	10	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, 2012

Tabel 2.20
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2011

TAHUN	SARANA PENDIDIKAN (Unit)			
	TK	SD/MI	SLTP/M.Ts	SLTA/MA
2009	101	136	35	16
2010	102	138	39	17
2011	124	138	39	17
2012	125	138	40	17

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, 2012

Tabel 2.21
Kondisi Sarana Pendidikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2012

NO	Sarana Pendidikan	Tahun (unit)								
		2010			2011			2012		
		B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1.	TK	121	11	193	252	10	6	148	6	6
2.	SD	651	93	41	746	142	17	762	129	-
3.	Madrasah Ibtidaiyah	40	3	4	32	3	3	37	3	-
4.	SMP	163	20	10	220	13	4	147	51	14
5.	Madrasah Tsanawiyah	37	4	5	26	-	-	47	4	-
6.	SMA	64	5	3	85	6	1	80	2	-
7.	Madrasah Aliyah	32	-	-	33	3	-	38	2	-

Keterangan :

B = Baik (satuan unit)

RR = Rusak Ringan (satuan unit)

RB = Rusak Berat (satuan unit)

Peran sektor swasta dan masyarakat di bidang pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Bone Bolango. Ke depan, kebijakan pendidikan di daerah harus diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan baik formal maupun informal, dengan dukungan sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan iklim dan budaya pendidikan yang maju dan mandiri sehingga akan memberikan feed back terhadap meningkatnya tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Bone

Bolango dan target pada tahun 2025 dimana Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu pusat pendidikan di Provinsi Gorontalo dapat terwujud dan tercapai.

3.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan yang merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat digambarkan dengan umur harapan hidup, mortalitas, morbiditas dan status gizi masyarakat. Sehat dalam pengertian secara luas, yakni bukan saja bebas dari penyakit dan kecacatan tetapi juga tercapainya keadaan kesejahteraan baik fisik, sosial dan mental. Beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan derajat kesehatan adalah : lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku.

Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Mortalitas dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup, dan Umur Harapan Hidup (UHH). Morbiditas dilihat dari indikator-indikator Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk, Angka Kesembuhan TB Paru BTA+, Prevalensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Berisiko), Angka Acute Flacid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 Tahun per 100.000 anak, dan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk. Sedangkan status gizi dilihat dari indikator Persentase Balita dengan Status Gizi di Bawah Garis Merah pada KMS dan Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi.

Salah satu faktor penting yang menunjang pelayanan kesehatan penduduk Bone Bolango adalah keadaan SDM kesehatan. Kondisi Kabupaten Bone Bolango yang memiliki 2 (dua) buah Rumah Sakit Umum Daerah, menuntut daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Selain SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan merupakan juga faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Distribusi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar telah lebih merata. Pada tahun 2011 setelah dilakukan pemekaran jumlah puskesmas yang ada sampai akhir tahun sebanyak 19 unit. Dengan demikian rata-rata rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 13,41. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, ada beberapa Puskesmas telah ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas dengan tempat perawatan. Puskesmas perawatan ini terutama yang berlokasi jauh dari rumah sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan, serta di wilayah terpencil. Hingga tahun 2011 jumlah puskesmas perawatan di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 2 buah yaitu Puskesmas Suwawa dan Puskesmas Bonepantai. Adapun jumlah Puskesmas Pembantu hingga tahun 2011 sebanyak 33 unit, Puskesmas Keliling sebanyak 18 unit, Polindes 27 unit, Posyandu 218 unit, Poskesdes 49 unit.

Tabel 2.22
Keadaan SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2011

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2009	2010	2011
1	Dokter Spesialis	Orang	2	4	2
2	Dokter Umum	Orang	11	10	21
3	Dokter Gigi	Orang	1	1	2
4	Perawat	Orang	58	74	162
5	Ahli Kesehatan Masyarakat	Orang	38	49	77
6	Apoteker	Orang	1	1	2
7	Ahli Gizi	Orang	18	48	35
8	Analisis Laboratorium	Orang	4	4	5
9	Penata Rontgen	Orang	5	5	5
10	Ahli Penyehatan Lingkungan	Orang	18	21	23
11	Bidan	Orang	51	48	131
12	Bidan Desa	Orang	50	52	104
13	Dukun Anak	Orang	-	58	115
14	Rumah Sakit	Unit	2	2	2
15	Puskesmas (PKM)	Unit	18	19	19
16	PKM Perawatan	Unit	2	2	2
17	PONED	Unit	2	3	3
18	PKM Pembantu	Unit	36	33	33
19	Polindes	Unit	48	27	27
20	Posyandu	Unit	204	218	218
21	Poskesdes	Unit	24	49	68
22	TFC	Unit	1	1	1
23	Pusling (R4)	Unit	18	18	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, 2012

Pada tahun 2025 diharapkan masyarakat Bone Bolango telah memiliki tingkat kesehatan yang maksimal dan berkelanjutan serta telah memiliki pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga indikator kesehatan utama dapat menyamai indikator tingkat nasional.

3.3. Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman diarahkan untuk penyediaan akses bagi masyarakat miskin, masyarakat pesisir dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya termasuk PNS terhadap perumahan yang layak, pengembangan dan penataan lingkungan perumahan, mengembangkan KASIBA dan LISIBA serta menyiapkan perangkat peraturannya dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan perumahan.

Penyediaan perumahan dengan program KASIBA merupakan upaya penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan luas 500 hektar untuk sekitar 5.000 unit rumah.

Peningkatan kualitas permukiman masyarakat terus digenjut melalui program dari Kementerian Perumahan Rakyat dimana Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2012 mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.289 rumah dan pada tahun 2013 mendapatkan kuota sebanyak 1.700 rumah.

Tabel 2.23
Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Dan Jumlah Komunitas Adat Terpencil
Di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009-2012

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Komunitas Adat Terpencil
1	2	3
2009	6.233 Unit	460
2010	6.120 Unit	460
2011	6.072Unit	460
2012	3.783 Unit	375

Sumber Data : Dinas Nakertransos Kabupaten Bone Bolango, 2012

Selain peningkatan kualitas perumahan, permasalahan lainnya adalah kondisi sarana prasarana sanitasi permukiman,

ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah di Kabupaten Bone Bolango.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2031 maka arahan/design spasial pembangunan wilayah menjadi jelas dan tersistematis dimana dari arahan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut telah ditetapkan pusat-pusat yang akan memberikan pengaruh terhadap wilayah itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Ditetapkannya Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
- Ditetapkannya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- Ditetapkannya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- Ditetapkannya Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

3.5. Perhubungan

Dari segi kebijakan sektor transportasi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi antar kecamatan dan antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dimana sistem transportasi yang harus disiapkan haruslah efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan

teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

3.6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Untuk subsektor perikanan dan kelautan, Kabupaten Bone Bolango mempunyai garis pantai sepanjang 60 km dengan luas perairan 1.300 Ha dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar yang berada pada wilayah perikanan yang cukup luas pada WPP 715. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut.

Untuk sub sektor kehutanan, Kabupaten Bone Bolango memiliki kekayaan sumberdaya hutan yang cukup potensial. Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango adalah seluas \pm 140.335,41 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung 15.929,55 Ha, Hutan Produksi Terbatas 18.841,67 Ha, Hutan Produksi Tetap 824,04 Ha, dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 104.740,15 Ha. Investasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu terutama untuk pengembangan kayu jati, dan jabon. Potensi lainnya adalah pengembangan industri hasil hutan seperti industri meubel berbahan kayu, rotan dan lain-lain.

Pada sektor pertambangan dan energi, potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas, tembaga, batu gamping (*lime stone*), Andasiti, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, feldspar dan lempung (*clay*). Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Bone Bolango. Secara geologis, potensi bahan tambang Kabupaten Bolango tersebar di beberapa kecamatan dengan jenis dan potensi yang beragam. Issu sentral dalam pertambangan potensi pertambangan

dimana sampai tahun 2013 ini jumlah rumah yang memiliki jamban hanya sekitar 36% sehingga perlu ada upaya-upaya berkelanjutan yang harus dilakukan pemerintah sehingga kedepannya setiap rumah dapat memiliki jamban keluarga.

Tabel 2.24
Data Rumah Dengan Kepemilikan
Sarana Jamban Keluarga
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jamban Keluarga		% Yang Memiliki Jamban
			Memiliki Jamban	Tidak Memiliki Jamban	
1	2	3	4	5	6
1	Suwawa Timur	1.036	512	524	49
2	Suwawa	2.170	1.088	1.082	51
3	Suwawa Tengah	1.036	553	483	53
4	Suwawa Selatan	936	118	818	13
5	Kabila	3.391	2.054	1.337	61
6	Tilongkabila	3.225	1.059	2.166	33
7	Botupingge	1.140	528	612	46
8	Tapa	1.444	849	595	59
9	Bulango Utara	1.419	355	1.064	25
10	Kabila Bone	2.055	258	1.797	13
11	Bone Pantai	1.196	392	804	33
12	Bulawa	1.714	141	1.573	8
13	Bulango Timur	1.027	379	648	37
14	Bulango Selatan	1.910	903	1.007	47
15	Bulango Ulu	613	148	465	24
16	Bone Raya	1.345	154	1.191	11
17	Bone	1.646	374	1.272	23
18	Pinogu	540	40	500	7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, 2013

3.4. Penataan Ruang

Dengan adanya perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 dan dinamika perkembangan daerah Kabupaten Bone Bolango maka telah dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 dimana hasil revisi penataan ruang wilayah tersebut menjadi acuan dasar dalam perencanaan pembangunan/penataan ruang di Kabupaten Bone Bolango. Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Bone Bolango adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang mengakomodasikan keterkaitan antar kawasan dengan mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan ekologis. Agar tujuan dari penataan ruang Kabupaten Bone Bolango dapat tercapai maka perlunya Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dilakukan dalam pengembangan struktur

yang berada di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang menimbulkan aktivitas *illegal mining*.

Dalam bidang energi, pasokan listrik di Kabupaten Bone Bolango masih melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tersambung melalui Unit Kerja KJG Kabila yang mencapai 6.649 Pelanggan atau 56,1% dari total pelanggan. Sementara yang memanfaatkan Unit PLN PP Tapa dan SR Bilungala masing-masing 3.130 dan 2.052 pelanggan. Saat ini ratio elektrifikasi sekitar 64,51% sehingga memang diperlukan upaya-upaya peningkatan ratio elektrifikasi tersebut agar seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango dapat memiliki sambungan listrik., hal tersebut dapat diupayakan melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, tenaga surya, dan angin.

Akselarasi pembangunan di daerah ini harus diimbangi dengan perbaikan kualitas manajemen dan eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta tidak menimbulkan dampak negatif untuk wilayahnya sendiri dan sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah tidak hanya bisa dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang (*sustainable development*). Perlu implementasi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan keutuhan ekosistem hutan, terutama yang berkenaan dengan rentannya daerah atau wilayah tertentu terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor serta pencemaran air akibat penggundulan hutan yang tidak terkendali dan penambangan liar.

Guna mengimbangi tingkat pemanfaatan sumberdaya alam perlu dilakukan upaya-upaya yang intensif untuk mengembalikan, memelihara dan melestarikan fungsi kawasan sehingga bisa dikelola dalam jangka panjang. Selama lima tahun terakhir telah dilakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan antara lain: pembinaan dan pelatihan SDM di sekitar hutan, studi eksplorasi potensi dan masalah lingkungan, implementasi studi amdal. Disamping itu, eksploitasi sumberdaya hutan dan kawasan termasuk pertambangan di Kabupaten Bone Bolango perlu dibarengi dengan usaha yang serius untuk menangani kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai

konsekuensi dari pembangunan yang berkelanjutan dan lestari. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antarpenggunaan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sampai tahun 2025 nanti agar Kabupaten Bone Bolango tidak mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.

3.7. Ketenagakerjaan

Pembangunan Kabupaten Bone Bolango adalah untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya yang menempatkan penduduk pada peranan yang sangat penting baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Agar program pembangunan yang dilaksanakan itu dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal perlu didukung oleh tersedianya informasi yang lengkap tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Bone Bolango yang sangat penting sebagai dasar dalam menentukan perencanaan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.

Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk 10 tahun keatas yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan pada saat pencacahan. United nation mendefinisikan angkatan kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai penduduk yang memproduksi barang dan jasa secara ekonomi, yang mencakup mereka yang tidak bekerja tetapi bersedia bekerja.

Tabel 2.25
Kondisi Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010

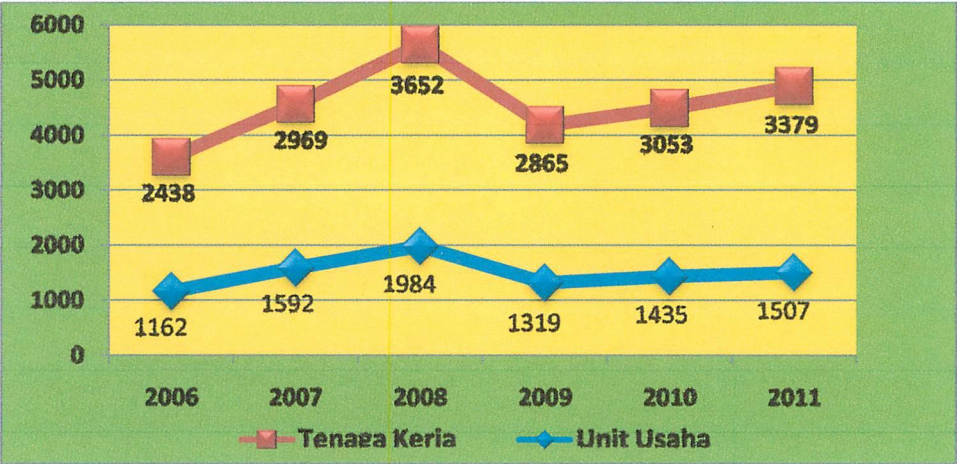
No	Uraian	2010
1.	Jumlah Angkatan Kerja (15-60 Tahun)	801
2.	Jumlah Penduduk Bekerja	306
3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	1.634
4.	Jumlah Pencari Kerja	1.634
5.	Pencari Kerja yang Terdaftar	803
6.	Rata-rata upah minimum (Rp,-)	762.500

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, 2012

3.8. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan data directory perusahaan Industri Kecil Menengah (IKM) formal dan non formal sampai dengan tahun 2011, di Kabupaten Bone Bolango terdapat 1.507 unit usaha industri dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.373 orang. Pada sektor perdagangan, jumlah perusahaan perdagangan barang dan jasa pada tahun 2011 tercatat 180 perusahaan, yang meliputi: 9 buah perusahaan perdagangan besar, 26 perusahaan perdagangan skala menengah dan 145 perusahaan perdagangan skala kecil. Dari 180 perusahaan tersebut, 33,33 % berada di kecamatan Kabila. Jumlah Koperasi sampai tahun 2011 berjumlah 112 unit, terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Pertanian, Koperasi Perkebunan, Koperasi Pondok Pesantren dan Koperasi Purnawirawan. Lembaga-lembaga ini termasuk lembaga ekonomi mikro yang berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah di Kabupaten Bone Bolango selain perbankan.

Tabel 2.26
Perkembangan Sektor Industri
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006-2011



Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil, dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango 2012

3.9. Penanaman Modal

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk merangsang penanaman modal di daerah ini antara lain adalah peningkatan usaha kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi, peningkatan kualihias pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur layanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal

Tabel 2.27
Jumlah Penanaman Modal
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007-2011

Tahun	PMDN	PMA	Total	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Ket
2007	-	-	-	-	-	-
2008	2	-	2	- PT. Oxindo Exploration	- Jasa Penunjang Pertambangan Umum	- Aktif
				- PT. Gorontalo Energi	- Pembangkit Tenaga Listrik	- Aktif
2009	1	2	3	- PT. China Coal Geologi Mining	- Jasa Penunjang Pertambangan Umum	- Tidak Aktif
				- PT. New Jember Golden Inter	- Jasa Penunjang Pertambangan	- Tidak Aktif
				- PT. Tenaga Listrik Gorontalo	- PLTU	- Aktif
2010	2	-	2	- PT. Panah Mas	- Pertambangan Tembaga	- Aktif
				- PT. Explorasi Indo Nusa Jaya	- Pertambangan Tembaga	- Aktif
2011	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo, 2011

3.10. Pariwisata

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Potensi pengembangan wisata umumnya wilayah pantai selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram/Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) memberikan peluang untuk pengembangan wisata pantai khususnya untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD serta menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.28
Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007-2011

Tahun	Jumlah obyek Wisata				Jumlah Sanggar Seni & Budaya
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah	
2007	3	1	2	3	1
2008	3	1	3	4	1
2009	3	2	3	4	1
2010	3	2	3	4	6
2011	3	2	3	4	8

Sumber: Dinas Perhubungan Pariwisata & Kominfo, 2012

Adapun perkembangan jumlah kunjungan wisata pada setiap obyek wisata di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Setiap Obyek Wisata
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2011

No	Jenis Obyek Wisata	Lokasi (Kecamatan & Desa)	Jumlah Kunjungan Per-Tahun Kunjungan		
			2009	2010	2011
1.	Wisata Alam Lombongo	Kec. Suwawa Desa Lombongo	1.770	3.562	3.918
2.	Wisata Bahari Olele	Kec. Kabila Bone Desa Olele	N/A	N/A	N/A
3.	Wisata Budaya Makam Raja	Desa Dunggala Kec. Tapa	N/A	N/A	N/A
4.	Kebun Binatang Mana	Kec. Tilongkabila Desa Lonuo	N/A	N/A	N/A
5.	Wisata Pantai Botutonuo	Kec. Kabila Bone	N/A	N/A	N/A
6.	Wisata Pantai Indah Bulawa	Kec. Bulawa	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango, 2011

3.11. Perdagangan

Pelayanan dibidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan dan penataan pasar tradisional.

Jumlah perusahaan perdagangan barang dan jasa di Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 14.43 persen dibanding pada tahun 2010. Pada tahun 2011 tercatat 180 perusahaan perdagangan barang dan jasa yang meliputi 9 buah perusahaan perdagangan besar, 26 perusahaan

perdagangan skala menengah dan 145 buah perusahaan perdagangan skala kecil dengan persebaran terbesar terdapat di Kecamatan Kabila sebesar 33,33%.

Hingga tahun 2011 kondisi infrastruktur perdagangan masih didominasi oleh pasar tradisional dengan jumlah pasar tradisional sebanyak 17 pasar dimana 5 diantaranya adalah pasar inpres dan 12 adalah pasar bangdes.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

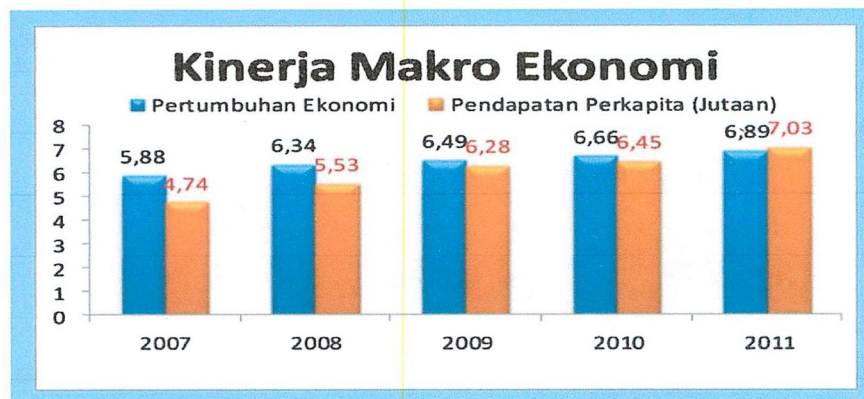
4.1. Kemampuan Ekonomi Makro.

Perekonomian makro Kabupaten Bone Bolango mengalami pertumbuhan yang baik, dimana antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari total PDRB 611.269 juta rupiah menjadi 1.019.512 juta rupiah pada tahun 2011.

Sedangkan hasil perhitungan untuk nilai PDRB Kabupaten Bone Bolango (atas dasar harga konstan) pada rentang waktu yang sama, rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 6,19%, dimana PDRB pada tahun 2007 sebesar 232.300 juta rupiah dan pada tahun 2011 jumlah PDRB sebesar 299.911 juta rupiah.

Struktur perekonomian masyarakat Bone Bolango didominasi oleh 5 sektor yang berpengaruh besar dan memberi kontribusi masing-masing di atas sepuluh persen terhadap PDRB Kabupaten Bone Bolango. Kelima sektor tersebut yaitu sektor Pertanian (39,57%), sektor Jasa (16,54%), Industri Pengolahan (11,84%), sektor Perdagangan (11,20%) dan sektor Keuangan & Jasa Perusahaan (11,09%). Kecepatan pergeseran dan penguatan kelima sektor tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang responsif terhadap pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.31
Kinerja Makro Ekonomi
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007-2011



Sumber : Dinas Pengelolaan Aset Daerah & Keuangan, Kab.Bone Bolango, 2012

4.2. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya antara lain dengan mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang potensial baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan hibah, sumber-sumber pembiayaan masyarakat dan pembiayaan lainnya.

Tabel 2.32
Ringkasan APBD Tahun 2009-2013
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Pendapatan Daerah	Jumlah (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendapatan Asli Daerah	11.105.324.881	6.712.335.537	8.613.526.316	12.751.949.000	15.146.211.250
2	Dana Perimbangan	297.595.066.405	312.170.424.730	318.637.523.275	375.457.113.549	436.578.456.204
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.733.775.121	11.439.942.411	110.973.843.807	46.107.399.000	86.021.867.431
TOTAL		317.434.166.407	330.322.702.678	438.224.893.398	434.316.461.549	537.746.534.885

Sumber : Dinas Pengelolaan Aset Daerah & Keuangan, Kab.Bone Bolango, 2013

4.3. Fasilitas Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan

khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 mencapai 436,77 km dengan pembagian jalan nasional 79 km, jalan provinsi 26,40 km dan jalan kabupaten 331,37 km.

Tabel 2.33
Panjang Jalan Menurut Kewenangan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

No	Jenis Jalan	Tahun 2011
1	Jalan Negara	79
2	Jalan Provinsi	26,40
3	Jalan Kabupaten	331,37
J u m l a h		436,77

Sumber : BPS Kab. Bone Bolango, Tahun 2012

Pada sektor transportasi laut, pada tahun 2007 telah dilaksanakan pengkajian atau studi kelayakan tentang pembangunan pelabuhan laut teluk tomini yang berlokasi di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone, selain itu rencana pengembangan pelabuhan laut di Kabupaten Bone Bolango telah di akomodir juga di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagai antisipasi pengalihan Pelabuhan Laut Gorontalo yang saat ini sangat sulit untuk dikembangkan akibat pendangkalan pada muara sungai Bone yang lokasinya berdekatan dengan pelabuhan Gorontalo.

Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi yang harus sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan

kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

4.4. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Modal dasar pembangunan suatu daerah adalah seluruh potensi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah oleh karena masyarakat sebagai sumber daya yang akan mengolah sumber daya alam tersebut harus dibekali kemampuan yang baik dan tepat sehingga kekayaan alam dari daerah tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah itu.

Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan secara tidak langsung akan menyebabkan tekanan penduduk yang semakin besar oleh karena itu pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif. Kualitas sumber daya manusia usia produktif tersebut harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dan produktif baik di skala lokal, skala provinsi dan skala nasional. Sehingga sumber daya manusia yang ada mampu memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas berlandaskan peningkatan produktivitas dan daya saing serta semakin terciptanya kreativitas dan daya inovasi daerah.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah ini telah memberikan hasil yang baik yang ditandai dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang menjadi permasalahan dalam upaya menggenjot akselerasi pembangunan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Bone Bolango meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan dinamika social budaya, kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi serta kapasitas dan kualitas pemerintahan.

A. Dinamika Sosial Budaya

1. Belum meratanya pelayanan pendidikan yang berkualitas yang berakibat pada rendahnya kualitas mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
2. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan pada wilayah-wilayah terpencil dan terisolir, belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan, serta keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya kesehatan pada tingkat layanan rujukan.

B. Kualitas Sarana Prasarana Wilayah

1. Belum adanya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antar kecamatan dan antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik, air bersih dan sanitasi terutama di daerah terpencil dan terisolir. Masih rendahnya ratio elektrifikasi yakni 64,51% sehingga perlunya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan memaksimalkan potensi sumber energi baru terbarukan.
3. Belum optimalnya penataan ruang wilayah khususnya pada pusat pelayanan kabupaten dan pusat-pusat kegiatan lokal termasuk belum adanya simpul pertumbuhan wilayah yang representative yang terkendala karena belum adanya prasarana terminal dan pusat perdagangan.

C. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang disebabkan karena dalam pemanfaatan ruang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai payung hukum untuk kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam belum memperhatikan keseimbangan lingkungan secara menyeluruh.
3. Kondisi sebagian besar wilayah Bone Bolango yang rawan bencana sehingga berpengaruh pada keterbatasan pendayagunaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi.

D. Pembangunan Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat lamban dan kurang berdaya saing dalam skala regional.
2. Struktur ekonomi daerah yang kurang kuat dengan perkembangan sektor-sektor non primer yang sangat lambat.
3. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin dengan angka kemiskinan 17,39% pada tahun 2011.
4. Belum berkembangnya komoditas unggulan yang memiliki daya saing regional dan menjadi sektor base.

E. Tata Kelola Pemerintahan

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum khususnya pembenahan perilaku, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan di semua tingkatan.
3. Pelayanan publik masih belum prima.

2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Adapun isu strategis pembangunan daerah yang masih membutuhkan penanganan secara serius dan sistemik, berkelanjutan serta komprehensif.

A. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan system pendidikan yang berkualitas, dan biaya pendidikan yang terjangkau. Peran sektor swasta dan masyarakat di bidang pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Bone Bolango. Ke depan, kebijakan pendidikan di daerah harus diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan baik formal maupun informal, dengan dukungan sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan iklim dan budaya pendidikan yang maju dan mandiri sehingga akan memberikan feed back terhadap meningkatnya tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

B. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis. perbaiki sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat, serta jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh Masyarakat Bone Bolango.

C. Pengembangan Sistem Transportasi

Pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo yang merupakan ibukota Provinsi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi sehingga Kabupaten Bone Bolango perlu untuk pengembangan system transportasi terpadu yang menghubungkan antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bone Bolango dengan Kota Gorontalo sehingga memperlancar kegiatan produksi. distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa

D. Pengembangan Sistem Jaringan Listrik

Pemenuhan kebutuhan energi/penyediaan pasokan listrik harus terus ditingkatkan baik yang bersumber dari PLN (energi fosil) maupun dari sumber energi baru terbarukan (EBT) mengingat ratio elektrifikasi yang masih rendah dan masih banyak masyarakat yang belum menikmati pasokan listrik terutama di daerah terpencil. Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi ketersediaan sumber daya alam energi panas bumi (*Geothermal*) dan sumber daya air (sungai) yang memiliki debit air cukup besar sehingga potensi ini dapat dimaksimalkan untuk menjadi sumber pasokan listrik energi baru terbarukan (EBT) dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik baik dalam skala besar (Wilayah kabupaten Bone Bolango) maupun skala kecil (Kecamatan).

E. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Dengan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum yang masih sangat terbatas khususnya melalui jaringan perpipaan mengharuskan Pemerintah Daerah memebrikan fokus perhatian pesar pada penyediaan akses air minum bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan sumber daya air yang sangat besar yang dimiliki Bone Bolango membutuhkan sinergitas optimal dengan penyediaan sistem pengolahan air bersih dan jaringan distribusinya hingga ke lingkungan pemukiman masyarakat.

F. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Akselarasi pembangunan di daerah harus diimbangi dengan perbaikan kualitas manajemen dan eksploitas sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta tidak menimbulkan dampak negatif untuk wilayahnya sendiri dan sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah tidak hanya bisa dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang (*sustainable development*). Perlu implementasi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan keutuhan ekosistem hutan, terutama yang berkenaan dengan rentannya sebagian wilayah tertentu terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor serta pencemaran air akibat penggundulan hutan yang tidak terkendali dan penambangan liar. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

G. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031, maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan penggunaan ruang yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum.

H. Pembangunan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari income riil perkapita dan laju perkembangan PDRB, secara agregat struktur perekonomian makro daerah Kabupaten Bone Bolango masih belum kuat, namun trend kinerja pertumbuhan ekonomi daerah meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan indikator makro tahun 2011 sebesar 6,89 dimana angka ini masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo sebesar 7,68% . Demikian halnya dengan angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 17,39%, sebagai akibat dari implementasi kebijakan yang belum terintegrasi dan terarah.

Dalam rangka meminimalisir masalah kemiskinan maka arahan kebijakan lebih ditujukan pada optimalisasi kinerja sektor pertanian, perdagangan, bangunan, pertambangan dan jasa yang tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar, serta menggali potensi daerah lainnya seperti sektor pariwisata dan industri, yang ditopang dengan ketersediaan dan akses sarana prasarana transportasi yang merata. Optimalisasi kinerja dari beberapa sektor tersebut, diharapkan juga memberikan *multiplier effects* terhadap penyediaan lapangan pekerjaan dan perbaikan struktur ekonomi daerah.

I. Reformasi Birokrasi

Masih terdapat berbagai permasalahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bermuara pada inefektifitas dan inefisiensi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti besaran struktur organisasi yang tidak seimbang dengan beban kerja, rendahnya kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur, pengelolaan administrasi yang lemah, serta belum optimalnya kapasitas

perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan program pembangunan dan pengawasan pembangunan. Oleh sebab itu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan untuk memantapkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik, dengan melakukan peningkatan kinerja secara terpadu dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Implementasi *Good Governance* berupa penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektifitas, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih perlu diperkuat pelaksanaannya.

BAB IV
VISI DAN MISI
KABUPATEN BONE BOLANGO 2005-2025

1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang dan tantangan pembangunan daerah, maka visi Kabupaten Bone Bolango 2005 - 2025 adalah:

“BONE BOLANGO MAJU DAN BERMARTABAT”

Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan daya saing daerah dan kemakmuran masyarakat Bone Bolango.

Pernyataan Visi Kabupaten Bone Bolango diatas, memiliki makna :

- **Maju**, berarti adanya kehendak masyarakat untuk menempatkan Daerah Bone Bolango memiliki kapabilitas sosial ekonomi yang selalu tumbuh secara berkeadilan dan berdaya saing tinggi, serta berkehendak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju kearah yang lebih baik. Maju juga berarti bahwa Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah terus melakukan perubahan dan pengembangan diri untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. Tingkat kemajuan dapat diukur berdasarkan kualitas SDM, peningkatan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan keunggulan wilayah dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, terkendalinya perubahan lingkungan alam dan binaan melalui kesadaran pembangunan yang berkelanjutan, serta kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Beberapa fokus unggulan wilayah berskala regional yang ingin kita capai antara lain sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan dan sumber daya air regional, pusat pengembangan pendidikan, sejarah dan budaya daerah, serta kawasan ekonomi khusus untuk pengembangan sektor pariwisata, pertambangan dan energi.
- **Bermartabat**, mengandung maksud bahwa masyarakat Bone Bolango telah mencapai derajat yang lebih baik, sesuai dengan tata nilai dan perilaku sosial yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa. Disamping itu bermartabat dimaksudkan penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah sehingga memiliki identitas kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Bone Bolango pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada

umumnya. Tujuan kedua dimaksud tersebut menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon pesatnya modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh dalam misi pembangunan jangka panjang kabupaten Bone Bolango yakni sebagai berikut:

a. MISI MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERBASIS PADA POTENSI KEUNGGULAN LOKAL.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone Bolango melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat yang terintegrasi dan berkelanjutan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Pengembangan usaha ekonomi tersebut akan berbasis pada potensi lokal daerah, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri berbasis keunggulan lokal, pariwisata, serta koperasi dan usaha kecil menengah yang berorientasi pada keunggulan komparatif dan kompetitif.

Dalam jangka panjang, beberapa fokus unggulan Bone Bolango dalam skala regional Provinsi Gorontalo yang ingin kita raih yakni sebagai kawasan strategis industri dan jasa pendidikan, serta kawasan ekonomi khusus untuk pengembangan sektor pariwisata, sektor pertambangan dan energi, dan sektor sumber daya air.

Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, pertumbuhan dan membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

b. MISI MEWUJUDKAN MASYARAKAT BONE BOLANGO YANG BERKUALITAS

Misi ini mengandung makna untuk menciptakan masyarakat Bone Bolango yang mempunyai derajat kehidupan yang lebih baik sesuai

dengan tata nilai dan perilaku sosial yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa serta menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah sehingga memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Misi ini mengandung makna, untuk peningkatan sumber daya manusia Bone Bolango yang sehat, cerdas, berdisiplin kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, bertanggung jawab, memiliki iman dan taqwa, serta menguasai iptek. Dengan peran Bone Bolango sebagai kawasan strategis pendidikan dan pengembangan sejarah dan budaya diharapkan akan lebih memperkuat kapasitas sumber daya manusia Bone Bolango.

Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tinggi dan meratanya tingkat pendidikan, membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; pertumbuhan penduduk seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

c. MISI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH.

Misi ini ditujukan untuk membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, dan amanah; meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi, membangun dan menjaga kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif; penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum; makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi

tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen, dukungan, dan partisipasi stakeholders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

3. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone Bolango tahun 2005–2025 adalah mewujudkan masyarakat yang maju dan bermartabat.

- a. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal.
- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
- c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO 2005-2025

Pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bone Bolango 2005-2025. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergitas koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 2005-2025, maka pencapaian sasaran-sasaran pokok pada setiap misi pembangunan jangka panjang daerah yakni sebagai berikut:

1.1. Misi 1 : Terwujudnya Perekonomian Bone Bolango yang Maju dan Berdaya Saing

Perekonomian kuat dan berkualitas memberikan kesempatan bagi penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah penduduk miskin. Peningkatan kegiatan ekonomi harus didukung oleh kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin merata dan berkelanjutan dengan memaksimalkan pendayagunaan potensi keunggulan lokal, yang didukung stabilitas ekonomi dan politik yang sehat dan dinamis sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perwujudan Perekonomian Bone Bolango yang maju dan mandiri diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran pokok sebagai berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan diatas rata-rata pertumbuhan provinsi, dan memberikan *multiplier effect* pada perluasan kesempatan kerja dan pengurangan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi Bone Bolango yang berkualitas dan berkesinambungan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan rata-rata Provinsi Gorontalo serta

peningkatan daya saing daerah yang mendorong penciptaan lapangan kerja (pro-job) serta pengurangan angka kemiskinan (pro-poor) dan disparitas pembangunan antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diarahkan dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal, mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran serta peningkatan komoditas base. Peningkatan pertumbuhan ekonomi difasilitasi melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan perdesaan, penciptaan usaha industri hulu hilir terpadu, pengembangan insentif bagi UMKM inovatif, pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta dan peningkatan hubungan kerjasama antar daerah, serta pembangunan infrastruktur wilayah secara terarah dan terintegrasi. Dalam jangka panjang, harus dilakukan pula transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan produktivitas daerah melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan.

2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan lokal dengan semakin memperkuat peran sektor sekunder dan sektor tersier yang memiliki konektivitas dengan sektor primer.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan struktur perekonomian dengan mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa sebagai penggerak utama untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktifitas usaha perkebunan, menghidupkan usaha peternakan dari hulu ke hilir, dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang berorientasi kepada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah.

Penguatan struktur ekonomi diarahkan melalui perbaikan iklim usaha, sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pengembangan kerjasama dengan wilayah lain, peningkatan akses pasar ekspor, pengelolaan konsumsi, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah serta pemantapan rantai pasokan.

Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikembangkan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan produktif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemberdayaan usaha mikro yang strategis diarahkan untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha dengan pengembangan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perubahan struktur perekonomian Bone Bolango.

3. Tumbuhnya usaha ekonomi pedesaan yang mendukung penguatan ekonomi daerah.

Percepatan pembangunan pedesaan diarahkan untuk mendayagunakan sumber daya lokal secara terarah dan berkelanjutan terutama pada wilayah-wilayah produksi, pusat pemukiman, kantong kemiskinan dan ketertinggalan dengan mengembangkan basis-basis produksi dan mengembangkan agribisnis atau agroindustri sesuai dengan potensi sumberdaya yang berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan secara terintegrasi dengan wilayah perkotaan agar dapat memenuhi kebutuhan perkotaan sehingga menjadi satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung dan berkaitan.

4. Terwujudnya produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya alam lokal secara merata dan berkelanjutan.

Peningkatan daya saing diarahkan melalui peningkatan produktifitas komoditas unggulan melalui pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan wilayah, pengembangan industri hulu hilir terpadu berbasis unggulan lokal, pengembangan teknologi pengolahan yang sesuai dengan komoditas unggulan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan, pemasaran serta penyediaan infrastruktur pendukung yang mendorong daya saing komoditas unggulan.

Pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan regional sebagai sektor base diarahkan melalui pengembangan sektor pariwisata, sektor pertambangan dan energi, dan sektor sumber daya air serta pengembangan industri dan jasa pendidikan.

5. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk seluruh masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan stabilitas, keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango yang diarahkan melalui (1) peningkatan produksi dalam daerah khususnya beras secara berkelanjutan, peningkatan keanekaragaman dan ketersediaan produksi pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta olahannya, (2) pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif yang menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat (4) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli khususnya bagi masyarakat tertentu yang rawan pangan (5) Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan (6) mendorong, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan keanekaragaman pangan (7) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan.

6. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin dibawah angka rata-rata nasional.

Penurunan penduduk miskin diarahkan untuk menekan angka kemiskinan dibawah 6% melalui peningkatan dan perluasan program perlindungan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan kapasitas dan kemandirian masyarakat, pengembangan usaha ekonomi rakyat yang terarah dan berkelanjutan, pengembangan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi pedesaan.

7. Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten.

Pengembangan sarana prasarana wilayah khususnya infrastruktur transportasi, energi listrik, air dan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung kegiatan social ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mobilitas manusia, barang maupun jasa secara lokal maupun regional, peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan transportasi dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah serta membentuk struktur ruang yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan struktur dan pola ruang yang terarah. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan infrastruktur jalan yang eksisting, pengembangan aksesibilitas pada wilayah terpencil dan terisolasi, serta pembangunan jalur lintas selatan Suwawa-Kabila Bone-Bolaang Bongondow Selatan, dan jalur lintas utara Tapa-Atinggola-Bolaang Mongondow Utara, serta pengembangan ring road Bone Bolango.

Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan jaringan energi hingga keseluruhan desa dan dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan pemanfaatan energi terbarukan terutama mikrohidro dan energi surya;

Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan social ekonomi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas serta peningkatan pemerataan dan penyebaran pembangunan perumahan dengan tetap yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pembangunan Rencana Tata Ruang Bone Bolango diarahkan untuk menjadi acuan kebijakan dan penataan pembangunan spasial untuk lintas sektor dan wilayah sehingga meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan sesuai dengan hierarki dan fungsi, serta meningkatnya akses pelayanan secara merata dan berhierarki.

8. Terwujudnya peningkatan investasi yang menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan investasi diarahkan dengan memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Bone Bolango untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menciptakan iklim yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan regulasi yang mendukung sehingga dapat menarik penanaman modal dalam negeri dan asing dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango serta memberikan insentif bagi pengembangan produk-produk unggulan lokal.

1.2. Misi 2 : Terwujudnya Masyarakat Bone Bolango yang Berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia Bone Bolango ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya kepribadian dan integritas moral masyarakat, kualitas daya saing masyarakat, meningkatnya indeks pembangunan manusia serta meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan tumbuhnya sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai agama, moral dan budaya.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kualitas masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang sejahtera dan berakhlak mulia serta mampu berdaya saing. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang

berorientasi pada penciptaan insan kreatif dan inovatif. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengembangan insentif dan disinsentif bagi usaha baru masyarakat serta mengernbangkan kerjasama dengan swasta dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tumbuhnya karakter masyarakat yang tangguh, disiplin, taat hukum, kompetitif, berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, dinamis dan bewawasan IPTEK.

Peningkatan perilaku masyarakat yang memiliki jiwa patriotic, kreatif dan inovatif, disiplin, taat asas dan hukum serta menjunjung tinggi etika dan budaya daerah yang ditujukan untuk meningkatkan upaya pembinaan kesadaran hukum dan ketertiban kepada masyarakat serta penguatan penegakan disiplin dan hukum yang berwibawa melalui penataan pranata hukum, penerapan insentif dan disinsentif dalam penegakan hukum, pengembangan keamanan lingkungan yang handal dan penguatan aspek budaya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun karakter budaya masyarakat.

Pembentukan karakter tersebut diprioritaskan pula bagi terwujudnya generasi muda yang sehat, mandiri, produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki moral dan rasa kebangsaan yang tinggi, serta terwujudnya peningkatan peluang dan peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata, adil dan berdaya saing.

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas. berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga

kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

Pengembangan pendidikan diarahkan pada perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis.

Pengembangan pendidikan di Bone Bolango difokuskan pula untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kawasan strategis pendidikan dan pengembangan sejarah dan budaya daerah dalam skala regional.

3. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone Bolango secara adil dan merata melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemenuhan sarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang dibarengi dengan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasinya.

1.3. Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan manajemen dan administrasi pemerintahan daerah serta lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemerintah dituntut membuat kebijakan dan strategi pembangunan inovatif yang mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai pranata atau lembaga yang eksis dalam seluruh jenjang pelayanan publik, pemerintah daerah menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong akselerasi pembangunan. Peran dan fungsi yang strategis ini akan efektif bila pemerintah mampu membangun pemerintahan yang amanah (*Good Governance*).

Kondisi tersebut akan semakin kuat apabila tercipta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis serta peningkatan profesionalisme dan etos kerja aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya reformasi birokrasi dan perbaikan kapasitas kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dan handal dalam menjalankan amanah rakyat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan melalui penataan kelembagaan, administrasi dan manajemen pemerintahan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, dan penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Di samping itu reformasi birokrasi dilaksanakan secara komprehensif dalam semua aspek pemerintahan termasuk perbaikan proses pelayanan masyarakat dan penataan tata laksana serta manajemen organisasi.

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur harus terus dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkatan, lini pemerintahan dan semua kegiatan melalui pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan

pengawasan masyarakat, serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para aparatur terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penciptaan komunikasi dan kemitraan yang konstruktif antar eksekutif, legislative dan penyelenggara pemerintahan lainnya akan terus ditingkatkan dalam mendukung suksesnya keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada percepatan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang mendukung pelayanan publik, serta peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah dalam rangka peningkatan kualitas kesadaran dan integritas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance*.

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi, disiplin, profesionalisme dan etika aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas etika dan moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan public yang prima.

3. Tersedianya pelayanan publik yang prima dan menjunjung tinggi aspirasi dan dinamika masyarakat.

Peningkatan pelayanan publik yang prima diarahkan untuk memberikan bentuk layanan yang mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat dengan cepat, mudah dengan biaya yang terjangkau serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prima dikembangkan melalui kerangka regulasi yang terstadarisir yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan, peningkatan pengetahuan, penguasaan teknis, kemampuan manajerial dan

kepemimpinan aparatur, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan publik handal dan berkualitas.

4. Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kerangka *good governance*.

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkualitas merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan publik yang berkualitas juga mendorong terwujudnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan didukung data dan informasi yang relevan dan akurat dalam suatu proses pengambilan keputusan yang inklusif. Disamping itu peningkatan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan, pengembangan basis data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir, pengembangan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan akuntabel, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan yang konsisten.

5. Terciptanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memenuhi kebutuhan fiskal dalam pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkesinambungan melalui peningkatan sumber sumber pendapatan asli daerah, pengembangan kemitraan (Public Private Partnership), pengembangan investasi daerah, serta peningkatan mobillitas ekonomi yang member efek stimulus fiskal bagi peningkatan alokasi dana transfer khususnya dana bagi hasil pajak untuk pembangunan daerah.

6. Terciptanya komunikasi dan kemitraan yang konstruktif antar eksekutif, legislative dan penyelenggara pemerintahan lainnya.

2. ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BONE BOLANGO

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango memuat berbagai arahan dan strategi dalam memaksimalkan keunggulan wilayah serta meminimalisir masalah yang ada sehingga dalam perencanaannya harus memperhitungkan semua aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai sinergisitas wilayah dari rencana pembangunan dan pengembangan ruang-ruang sekitarnya.

Arahan pembangunan Kabupaten Bone Bolango menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan pada kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Arahan pembangunan menurut Rencana Tata Ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang serta kawasan strategis yang saling bersinergi sehingga terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan keserasian antar sektor di Kabupaten Bone Bolango.

2.1. Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Rencana Struktur Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi dan rencana penempatan prasarana wilayah. Adapun Kebijakan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah:

- Peningkatan akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan hierarkis, dengan strategi berupa :
 1. Mempromosikan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) berupa kota-kota satelit penyangga ibukota Kabupaten Bone Bolango.
 2. Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKL eksisting, PKLp, PPK dan PPL, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya.
 3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting.

4. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai.
 5. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, dengan strategi berupa:
 1. Meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat secara terpadu.
 2. Mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir dan terpencil.
 3. Meningkatkan ketersediaan jaringan energi listrik dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya energi terutama sumber daya energi yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
 4. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

A. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan sistem perkotaan (sistem kota-kota) bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antarwilayah sesuai fungsi yang diembannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur tata ruang yang telah direncanakan. Rencana pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Menetapkan Kecamatan Suwawa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yang dimana kecamatan ini merupakan ibukota kabupaten dan sebagai pusat pemerintahan dan diarahkan pada perencanaan pusat jasa pelayanan keuangan/bank, simpul transportasi, dan pusat pelayanan jasa lainnya.
2. Berkembangnya 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Kecamatan Tilongkabila dan Bone Raya yang berfungsi sebagai pusat pengolahan atau pengumpulan barang yang melayani beberapa kecamatan kota/kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kecamatan kota/kabupaten tetangga.

3. Berkembangnya 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: Kecamatan Tapa (Talumopatu), Kecamatan Kabila (Oluhuta), Kecamatan Kabila Bone (Batu Barani) dan Kecamatan Bone Pantai (Bilungala) yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kecamatan.

B. Arahkan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Bone Bolango dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur transportasi darat maupun laut, sehingga dapat menunjang sistem pusat pengembangan wilayah dan lokal Kabupaten Bone Bolango, dan menghasilkan pola jaringan transportasi yang terpadu, baik transportasi darat maupun transportasi laut. Pengembangan sistem prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mobilitas penduduk terutama pelaku pembangunan dan ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan produksi dan pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dengan demikian rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat dan laut adalah:

1. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN dan antara PKN dan PKW.
2. Mengembangkan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW dan antara PKW dengan PKL.
3. Mengembangkan jaringan jalan by pass sebagai penghubung PKN.
4. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan PKN

Sistem jaringan jalan disusun dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Rencana pengembangan infrastruktur jalan diarahkan pada rencana pembuatan jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antara wilayah yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan wilayah sekitarnya. Bentuk jalan baru tersebut adalah jalan lingkar yang melintasi Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Suwawa, jalan akses Aladi-Tulabolo, dan jalan akses Tulabolo-Pinogu. Rencana fasilitas transportasi jalan raya diarahkan pada pengembangan perencanaan terminal kendaraan umum. Terminal yang direncanakan adalah terminal

kendaraan umum tipe B di Kecamatan Suwawa, Desa Boludawa seluas 2,5 Ha dan Kecamatan Bone Seluas 2,5 H. Serta rencana terminal penumpang tipe C di Kecamatan Kabila Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Tapa Desa Talulobutu dan Kecamatan Bone Raya, Desa Tambulilato.

C. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan prasarana telekomunikasi terutama pada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau signal telepon genggam (*blank spot*). Pengembangan jaringan telekomunikasi akan dilakukan secara bertahap yaitu dengan Memprioritaskan penambahan sarana pos dan jaringan telepon; Melanjutkan penambahan jaringan yang sudah ada secara meluas; Menyediakan fasilitas telepon (wartel, jastel, dan lain-lain) pada daerah-daerah yang strategis.

Adapun rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone Bolango yaitu :

1. Rencana pembangunan stasiun telepon otomatis di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone yang menggunakan sistem jaringan kabel.
2. Rencana pembangunan *base transceiver station* yang menggunakan sistem jaringan nirkabel di Kec. Tilongkabila, Kec. Suwawa, Kec. Tapa, Desa Batu Barani, Desa Tambulilato, Desa Taludaa, Desa Tulabolo, Kecamatan pinogu serta setiap Ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam pusat - pusat kegiatan.

D. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Ketersediaan prasarana energi listrik dalam suatu wilayah akan berpengaruh terhadap sektor potensial, utamanya sektor yang berorientasi pada pengembangan perekonomian, disisi lain peningkatan kebutuhan energi listrik harus dibarengi dengan perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan kualitas, sehingga keterbelakangan dan isolasi daerah terhadap energi listrik dapat terlayani.

Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan instalasi listrik untuk meningkatkan pasokan daya dan pengembangan energi alternatif (Energi Baru Terbarukan) terutama dalam pemenuhan sumber listrik terhadap daerah-daerah yang terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut, sistem jaringan listrik yang ada akan dipelihara dan ditingkatkan

kualitasnya, dan perlu ada penambahan jaringan dan pembangkit baru.

Adapun rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Bone Bolango yaitu:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Suwawa Timur (Desa Pinogu, Desa Tulabolo Timur, Desa Tulabolo Barat, Desa Poduwoma). ; Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa); Kecamatan Suwawa Selatan (Desa Molintogupo, Desa Pancuran, Desa Bulantala Timur) ; Kecamatan Tilongkabila (Desa Tunggulo) ; Kecamatan Kabila Bone (Desa Biluango) ; Kecamatan Bone Pantai (Desa Olele); dan Kecamatan Botupingge.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro Kecamatan Suwawa Timur (Desa Tulabolo), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro dan Tenaga Hidro di Kecamatan Suwawa Timur (Desa Poduwoma), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kecamatan Bone (Desa Ilohuua), Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro di Kecamatan Bulango Utara (Desa Kopi), Pembangkit Listrik Tenaga Hidro di Kecamatan Bulango Ulu, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di Desa Ilohua, PLTM Bulango Utara di Desa Tuloa dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Pinogu (Desa Pinogu).
3. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone.
4. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (*Geothermal*) di Kecamatan Suwawa Selatan Desa Libungo dan Kecamatan Suwawa Tengah Desa Duano.

E. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Irigasi

Penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk suatu daerah, adapun arahan pengembangan sistem sumber daya air di Kabupaten Bone Bolango terdiri dari pengembangan sumber daya air bersih dan irigasi. Dimana Rencana sistem sumber air dan jaringan air bersih diarahkan pada pengembangan sumber air dan pemanfaatan sumber air baku lainnya serta pengoptimalisasian sistem dan distribusi/pengaliran air bersih dan jaringan (instalasi) pengolahan air bersih. Pemenuhan

kebutuhan air bersih melalui usaha ini direncanakan untuk melayani kawasan perkotaan dan perdesaan yang dialokasikan pada satuan wilayah pengembangan guna menunjang operasionalisasi kegiatan-kegiatan perkotaan dan perdesaan dimana dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat diperoleh melalui penyediaan air bersih oleh PDAM maupun penyediaan air bersih yang berasal dari SPAM.

Adapun rencana pengembangan sumber daya air untuk irigasi adalah mengembangkan waduk/bendungan (Lomaya – Alale – Pilohayanga), situ, dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air. Serta pengembangan waduk serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk penaggulangan banjir, pembangkit tenaga listrik, irigasi, dll.

F. Arahana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah

Fungsi utama jaringan drainase adalah mengalirkan air buangan (air hujan dan limbah cair) ke pembuangan akhir, sistem prasarana drainase yang direncanakan menggunakan sistem terbuka (riol terbuka) yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air hujan dan limbah rumah tangga. Pemilihan sistem ini dilakukan untuk memudahkan sistem pengawasan dan penyesuaian anggaran biaya. Perencanaan prasarana drainase dilaksanakan guna menghindari /mengurangi genangan ataupun luapan air hujan dengan perbaikan dan pembangunan saluran drainase yang didasarkan atas kondisi topografi dan kemiringan lereng wilayah untuk memudahkan pengaliran.

Perbaikan/pembangunan drainase diprioritaskan pada kawasan genangan air hujan. Sungai, kanal saluran irigasi, waduk dan bendungan sebagai badan air terbuka selain sebagai penerima air hujan juga berfungsi penerima buangan air drainase, maka diperlukan pematangan pada bibir sungai untuk menjaga kapasitas tampung air.

Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) akan dikembangkan pada instalasi rumah tangga terpadu, instalasi rumah sakit, instalasi farmasi, laboratorium, perumahan, rumah makan/restoran, tempat wisata dan instalasi sejenis lainnya.

G. Arahana Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan yang ada saat ini adalah dengan cara pengelolaan persampahan secara individu yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan sistem gali timbun, di bakar maupun dibuang di sungai. Oleh karena itu sudah saatnya ada perencanaan dalam pengelolaan sistem persampahan (mulai dari pengumpulan sampah ke tempat pembuangan sementara sampai pada tempat pembuangan akhir) dan pengembangan sarana prasarana persampahan di daerah ini. Pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dari sistem pengolahan persampahan yang ada. Sistem pengelolaan sampah akan dilakukan dengan proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dimulai dengan cara pemilahan sampah, sebagian di daur ulang dan sisa sampah organik sebagai bahan baku kompos. Adapun rencana lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yaitu di Kecamatan Bulango Utara dengan luas 5 ha dengan menggunakan pola *sanitary landfill*.

2.2. Rencana Pola Ruang Kabupaten

Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya sehingga terwujudnya penggunaan ruang yang seimbang antara daya dukung ekologis kawasan dan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara produktif dan berkelanjutan. Adapun Kebijakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (*ecoregion*); Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami ancaman antroposentris (dampak negatif kegiatan manusia) ; dan Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya ; dan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

A. Arahkan Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Bone Bolango memiliki total luas 15.929,60 Ha yang terletak di Kecamatan Suwawa Timur (407,96 Ha); Kecamatan Botupingge (611,93 Ha); Kecamatan Bulango Ulu (1.219,66 Ha); Kecamatan Bulango Utara (6.180,29 Ha); Kecamatan Kabila Bone (1.884,09 Ha), Kecamatan Suwawa Selatan (2.853,65 Ha); Kecamatan Bone Pantai (2.623,84 Ha) dan di Kecamatan Bone (148,13 Ha).

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya termasuk kawasan hutan lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Di wilayah Kabupaten Bone Bolango, kawasan lindung merupakan kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pantai dan Kecamatan Bone.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam berupa Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki luasan sebesar 104.740,15 Ha atau 53,5 % dari total luasan Kabupaten Bone Bolango. Kawasan taman nasional tersebut tersebar di beberapa kecamatan antara lain; Kecamatan Bulango Ulu dengan luas 20.226,04 Ha; Kecamatan Bulango Utara seluas 143,22 Ha; Kecamatan Tilongkabila dengan luas 1.346,07 Ha; Kecamatan Suwawa dengan luas 4.511,64 Ha; Kecamatan Suwawa Tengah dengan luas 835,71 Ha; Kecamatan Suwawa Timur dengan luas

69.691,32 Ha; Kecamatan Bone Raya seluas 69,14 Ha dan Kecamatan Bone dengan luas 8.940,91 Ha.

5. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone Bolango diantaranya adalah kawasan rawan gempa. Kawasan lindung geologi yaitu kawasan rawan gempa bumi terbagi atas 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

- stabil, meliputi Kecamatan Bone (4.018,91 ha); Bone Pantai (1.256,52 ha); Bone Raya (487,24 ha); Botupingge (26,5 ha); Bulango Selatan (0,74 ha); Bulango Timur (378,8 ha); Bulango Ulu (1.517,88 ha); Bulango Utara (817,78 ha); Bulawa (651,24 ha); Kabila Bone (224,53 ha); Suwawa (287,5 ha); Suwawa Selatan (1.839,7 ha); Suwawa Tengah (790,53 ha); Suwawa Timur (18.326,72 ha); Tapa (326,74 ha) dan Kecamatan Tilongkabila (943,27 ha).
- kurang stabil, meliputi Kecamatan Bone (11.317,91 ha); Bone Pantai (9.265,96 ha); Bone Raya (5.705,79 ha); Botupingge (1.571,2 ha); Bulango Selatan (567,94 ha); Bulango Timur (804,17 ha); Bulango Ulu (24.228,77 ha); Bulango Utara (9.956,37 ha); Bulawa (8.474,89 ha); Kabila (1.273,82 ha); Kabila Bone (5.574,72 ha) ; Suwawa (5.462,67 ha); Suwawa Selatan (3.752,24 ha); Suwawa Tengah (1.552,3 ha); Suwawa Timur (64.196,25 ha); Tapa (939,08 ha) dan Tilongkabila (3.805,09 ha).
- tidak stabil, meliputi Kecamatan Bone Pantai (25,82 ha) dan Kabila Bone (45,64 ha).

B. Arahkan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. kawasan hutan produksi dibedakan atas kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Areal yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dan memenuhi kriteria sebagai hutan produksi terbatas sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/KPTA/UM/8/1981, maka areal tersebut dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang berperan sebagai kawasan penyangga. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan

hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan tanam. Secara keseluruhan, luas areal HPT di Kabupaten Bone Bolango adalah 18.841,67 ha atau 9 % dari luas wilayah kabupaten Bone Bolango, dengan rincian pembagian adalah sebagai berikut : Kecamatan Bone dengan luas 341,19 Ha; Kecamatan Suwawa Selatan dengan luas 138,50 Ha ; Kecamatan Bone Pantai dengan luas 1.349,51 Ha; Kecamatan Bulawa dengan luas 5.038,27 Ha; Kecamatan Bone Raya dengan luas 3.923,18 Ha; Kecamatan Bulango Ulu dengan luas 123,44 Ha; Kecamatan Bulango Utara dengan luas 26,06 Ha dan Kecamatan Suwawa Timur dengan luas 7.901,52 Ha.

Kawasan hutan produksi ini diarahkan untuk menstabilkan bahan baku industri yang berasal dari hutan produksi alam, meningkatkan produksi bahan baku yang berasal dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan melibatkan masyarakat lokal. Secara keseluruhan luas areal kawasan produksi di Kabupaten Bone Bolango adalah 824.04 ha. Yang terletak di Kecamatan Suwawa selatan dengan luas 148,09 Ha; Kecamatan Bone Raya dengan luas 54,11 Ha dan di Kecamatan Bone dengan luas 621,84 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan potensi sumberdaya wilayah untuk sektor pertanian, keragaman sifat lahan akan sangat menentukan jenis komoditas yang dapat diusahakan serta tingkat produktivitasnya. Hal ini disebabkan setiap jenis komoditas pertanian memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal.

Rencana untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di Kecamatan Bone, Bone Pantai, Bone Raya, Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Bulango Ulu, Bulango Utara, Bulawa, Kabila, Suwawa, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Tapa, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Pinogu dengan total luasan kurang lebih 11.456,54 Ha.

Arahan pengembangan kawasan peruntukan untuk sub sektor peternakan, meliputi Sentra ayam kampung di Kecamatan Suwawa Desa Tingkohobu dan Kecamatan Bone Pantai Desa Tongo; Sentra ayam ras petelur di Kecamatan Bulango Timur,

Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo dan kecamatan Tilongkabila, Desa Tamboo; Sentra ayam ras pedaging di Kecamatan Bulango Selatan Desa Ayula, Kecamatan Tilongkabila Desa Tamboo dan Kecamatan Tapa; Sentra itik di Kecamatan Tilongkabila Desa Iloheluma dan Kecamatan Kabila Desa Talango; Sentra kambing di Kecamatan Bulango Utara Desa Langge, Kecamatan Kabila Desa Dutohe dan Desa Talango, Kecamatan Bone Pantai Desa Bilungala serta Sentra sapi potong di Kecamatan Bulango Ulu Desa Owata, Kecamatan Bulango Utara Desa Boidu, Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa Timur Desa Tilangobula, Kecamatan Kabila Desa Poowo Barat.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya laut dan konservasi terumbu karang berada di wilayah perairan Kab. Bone Bolango di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 715 di Teluk Tomini yaitu di kecamatan Kabila Bone, Bone Pantai, Bulawa, Bone Raya dan Bone.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar : arah pengembangannya di Kecamatan Tapa, Bulango Timur, Kabila, Tilongkabila, Bulango Utara, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Pinogu, Bulango Selatan dan Kecamatan Botupingge.
- Kawasan pengolahan/*prosesing ikan*; arah pengembangannya di Kecamatan Kabila Bone.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi tambang yang besar, khususnya logam emas, dan batuan/mineral andesit, granit, sirtu, dan toseki. Sifat usaha pertambangan, selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam pemanfaatan potensi tambang harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta di setiap lokasi pertambangan harus tersedia kawasan pengolahan pemurnian mineral logam, bukan logam dan batuan.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Keberadaan suatu kawasan industri dalam konteks ekonomi secara teoritis, terkait setidaknya dengan bagaimana kegiatan industri dapat mengakses dengan mudah sumberdaya yang menjadi input produksinya dan pasar. Terdapat 3 (tiga) rencana lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bone Bolango, yaitu : Kawasan peruntukan industri besar, yaitu kawasan industri perikanan yang terdapat di Kecamatan Kabila Bone ; Kawasan peruntukan industri sedang, yaitu kawasan agroindustri yang terdapat di wilayah Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Suwawa Tengah dan Kawasan peruntukan industri rumah tangga, yaitu kawasan industri budaya dan kerajinan atau berupa kue-kue khas daerah yang rencana penempatan kawasan ini di Wilayah Tapa dan Bulango.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menuntut adanya potensi daerah wisata yang memiliki karakteristik yang khas, disamping ketersediaan infrastruktur serta kestabilan keamanan dalam menarik arus kunjungan wisatawan. Potensi-potensi wisata tersebut dapat berupa keragaman budaya, seni dan pesona alam. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada Pengembangan objek pariwisata pantai dan objek wisata bahari.

Adapun rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bone Bolango adalah pengembangan permukiman perkotaan yang diarahkan untuk mengisi kawasan belum terbangun di ibukota kecamatan terutama pada pusat-pusat wilayah pembangunan. Rencana peruntukan kawasan permukiman perkotaan terdapat di kawasan perkotaan Suwawa, Kabila, Tilongkabila, Tapa dan Bulango Selatan. Adapun rencana Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di arahkan di Kecamatan Tilongkabila (Desa Moutong, Desa Iloheluma dan Desa Butu) ,di Kecamatan Suwawa (Desa

Huluduotamo) dan di Kecamatan Bulango Selatan (Desa Ayula Selatan dan desa Ayula Tilango).

2.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas wilayah) dan lintas pelaku. Dengan demikian, perkembangan wilayah strategis memiliki efek sentrifugal karena dapat menggerakkan secara efektif perkembangan ekonomi sektor-sektor lainnya, perkembangan wilayah di sekitarnya serta kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas. Kawasan Strategis Kabupaten ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

A. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

1. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Suwawa;
2. Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila;
3. Kawasan industri rumah tangga, di Kecamatan Tapa dan kawasan industri agropolitan di Kecamatan Suwawa.
4. Kawasan Strategis Sungai Bone sebagai kawasan jasa dan pariwisata; dan
5. Kawasan Strategis Bone Pesisir sebagai kawasan minapolitan, pariwisata dan industri pengolahan perikanan

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

1. Kawasan Air Panas Lombongo, Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah;
2. Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan;
3. Air Terjun Ilohuhuwa Desa Ilohuhuwa, Kecamatan Bone;
4. Kawasan Danau Perintis, Kecamatan Suwawa;
5. Kawasan Taman Laut Olele, Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone;
6. Kawasan Pantai Botutonuo-Molotabu-Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone;
7. Kawasan Pantai Bulawa, Kecamatan Bulawa

C. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Cagar Budaya/Sejarah dan Makam Nani Wartabone yang terletak di Kecamatan Suwawa, Desa Bube Baru;
2. Kawasan Pendidikan, Kecamatan Tilongkabila – Suwawa;
3. Kawasan Siap Bangun (KASIBA), di Kecamatan Tilongkabila Desa Moutong, Desa Iloheluma, Desa Butu dan Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo;
4. Kawasan Desa Adat, di Kecamatan Pinogu;
5. Kawasan Strategis “*Integrated Eduecotourism*” di Kecamatan Tapa

5.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten Bone Bolango 2005-2025, serta mencapai sasaran-sasaran pokok sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, maka rencana pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tahapan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Penyusunan tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone Bolango 2005-2025 merupakan suatu upaya sistematis dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang Maju dan Bermartabat, untuk itu prioritas dan tema pembangunan untuk tiap tahapan pembangunan harus sejalan dengan upaya menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai visi dimaksud.

5.3.1 RPJM Daerah Pertama (2005-2010)

Tahapan awal pembangunan Kabupaten Bone Bolango sejak menjadi daerah otonom tahun 2003 hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo, merupakan tahapan peletakan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan berlandaskan pada bukti pembangunan dari Kabupaten Induk, maka pembangunan daerah tahap awal Kabupaten Bone Bolango merumuskan pencapaian visi “ *Mewujudkan Bone Bolango Bukan Sebagai Kota Ujung*”. Upaya pencapaian visi tersebut diimplementasikan ke dalam 5 misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan struktur kelembagaan Pemerintah Daerah dan Perangkatnya serta fasilitas penunjang operasional kelembagaan;
2. Mengimplemtasikasn sistem demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan yang bersih, transparan, profesional akuntabel, dan berwibawa.
3. Melaksanakan program kebutuhan dasar masyarakat melalui kegiatan pembangunan daerah berdasarkan analisa kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
4. Melaksanakan program unggulan Kabupaten Bone Bolango;
5. Meningkatkan aksesibilitas wilayah pengembangan infrastuktur Sarana dan Prasarana

5.3.2 RPJM Daerah Kedua (2010-2015)

Tahapan kedua masih merupakan lanjutan dari dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, maka tidak ada cara lain Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang baru harus memiliki kemampuan dan kemauan dalam hal membangun komitmen untuk melakukan perubahan terhadap kualitas dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik, maka RPJMD ke-2 merumuskan visi sesuai amanat yang termuat dalam visi RPJPD 2011-2030, yakni *“Terwujudnya Pemerintah yang Amanah, Demi Terciptanya Masyarakat Madani”*. Untuk mencapai visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2010-2014, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, taat hukum dan demokratis.
2. Menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Prioritas utama pada tahapan ini adalah **penguatan dan pemantapan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan bermartabat** melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; penanggulangan kemiskinan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi serta birokrasi dan tata kelola.

5.3.3 RPJM Daerah Ketiga (2015-2019)

Prioritas utama pada tahapan ini adalah pengembangan dan percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat

yang maju dan bermartabat melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; pemenuhan pelayanan dasar yang bermutu, terutama infrastruktur wilayah untuk percepatan pembangunan di setiap wilayah dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah; dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan serta peningkatan penanggulangan mitigasi bencana; keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

5.3.4 RPJM Daerah Keempat (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka **RPJMD ke-4 ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh sektor** dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing dengan menguatnya beberapa unggulan wilayah yang memiliki daya saing regional, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan holistik dan komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango sampai Tahun 2025.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan mensyaratkan pentingnya keterpaduan, keselarasan dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan dan peraturan perundangan. Dalam pelaksanaan pembangunan juga harus tetap diperhatikan peran, tanggung jawab dan tugas yang melekat pada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005–2025 merupakan acuan dan pedoman dalam:

1. Penyusunan Visi dan Misi calon bupati dan calon wakil bupati
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango
3. Menciptakan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah
4. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar fungsi pemerintahan daerah.
5. Menjadi acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan pembangunan
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, calon bupati dan calon wakil bupati harus memperhatikan RPJPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2005-2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2016-2020 dan periode 2021-2025

2. Lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Bone Bolango dengan didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan di dalam RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025.
3. Bupati Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025
5. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang merupakan penjabaran dari RPJPD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone Bolango berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran RPJPD dan memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Bappeda Kabupaten Bone Bolango bertugas membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang muatan pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan, serta mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone Bolango.
8. Dalam rangka menjamin konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Bone Bolango.

RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025 disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, top down dan bottom up dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Partisipasi ini

dilakukan agar masyarakat, tidak tidak saja sebagai sekadar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek pembangunan belaka, tetapi merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang sentral, strategis dan penting. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah ini akan sangat bergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan peran aktif masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya secara proaktif dan konstruktif.

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU